

**PERTUMBUHAN EKONOMI, DISTRIBUSI PENDAPATAN
DAN TINGKAT KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
(Tahun 1994-2003)**



SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
Guna memperoleh gelar sarjana jenjang strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Wiratama Wahyu Ardianto

No. Mhs : 96 213 110

Program studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2005

**PERTUMBUHAN EKONOMI, DISTRIBUSI
PENDAPATAN DAN TINGKAT KEMISKINAN
DI DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA
(1994 – 2003)**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Wiratama Wahyu Ardianto
Nomor Mahasiswa : 96213110
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2005**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 25 Agustus 2005

Penulis,

Wiratama Wahyu Ardianto

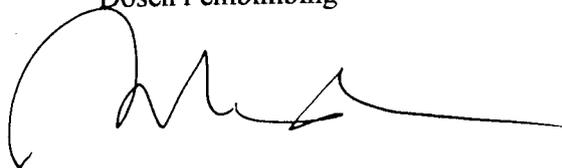
PENGESAHAN

PERTUMBUHAN EKONOMI, DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN TINGKAT KEMISKINAN DI DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA (1994 – 2003)

Nama : Wiratama Wahyu Ardianto
Nomor Mahasiswa : 96213110
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 25 Agustus 2005

telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing



(Drs. Sahabudin Sidiq, MA)

BEPITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PERTUMUHAN EKONOMI, DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN TINGKAT
KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (TAHUN 1994 - 2003)

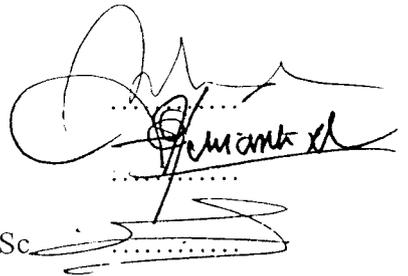
Disusun Oleh: WIRATAMA WAHYU ARDIANTO
Nomor mahasiswa: 96213110

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS
Pada tanggal : 13 September 2005

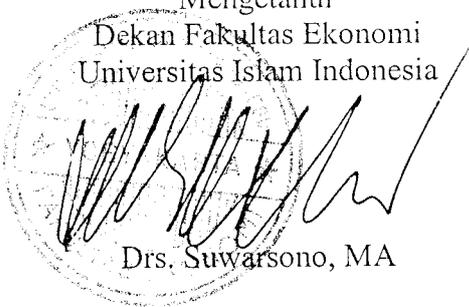
Penguji/Pembimbing Skripsi : Drs. Sahabudin Sidiq, MA

Penguji I : Drs. Nur Feriyanto, M.Si

Penguji II : Drs. Priyonggo Suseno, M.Sc



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. Suwarsono, MA

MOTTO

*"Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan,
Dia telah menciptakan manusia dan segumpal darah,
Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah, yang mengajar
(manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada
manusia apa yang tidak dzketahuinya."
(Al Qur'an, Surat ke-96: 1-5)*

*"Nabi s.a.w bersabda : tidak boleh ada rasa iri kecuali terhadap dua perkara (perlombaan):
orang yang diberi ALLAH harta serta kekuasaan untuk membelanjakan di jalan kebenaran:
dan orang yang dianugerahi ALLAH ilmu dari pelbagai perkara lalu ia mempertimbangkan
dengan itu dan
mengajarkannya (kepada orang-orang lain)."
(Maulana Muhammad Ali: 1992)*

*"Pelajarilah ilmu.
Maka mempelajarinya karena Allah, itu taqwa.
Menuntutnya, itu ibadah.
Mengulang-ulangnya, itu tasbih.
Membahasnya, itu jihad.
Mengajarkan orang yang tidak tahu, itu sedekah.
Memberikannya kepada ahlinya, itu mendekatkan diri kepada Tuhan."
(Ihya 'Al-Ghozali : 1986)*

*"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah,"
(Thomas Alva Edison)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memohon Ridlo Allah S.W.T.

Akan kupersembahkan Skripsi ini kepada :

“ kedua orang tuaku sebagai rasa sayang atas semua pengorbanan dan doanya, Istri tercintaku Yuni,yang selalu memberi cinta, kasih sayang, semangat dan doa serta kesabarannya ..kakaku mas seta dan adikku siska, terima kasih udah Bantu aku selama ini, juga saudaraku Q'Q, terima kasih udah mau bantu ngetik, doa dan persaudaraannya selama ini.. Dik henny dan adji terima kasih atas bantuannya selama ini. Juga kepada ponakanku vanny, Arla, Arya, della dan adit...

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum wr.wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita senantiasa diberi kesempatan untuk menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. Salam dan shalawat kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikut-pengikutnya.

Sebagai sebuah syarat untuk memperoleh gelar strata 1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia bukan menjadi tujuan satu-satunya dari penulisan skripsi ini, namun lebih jauh dari itu skripsi merupakan sarana untuk menerapkan pengetahuan yang telah didapat untuk menganalisa dan menerapkannya pada realitas ekonomi yang ada.

Sudah barang tentu dalam upaya untuk mewujudkan usaha tersebut banyak sekali pihak-pihak yang memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tuaku atas kesabaran, kasih sayang, dan doanya.
2. Drs. H. Suwarsono, MA. Dekan fakultas ekonomi Universitas Islam Indonesia, yang penulis kenal sebagai sosok yang akrab dan bersahabat dengan mahasiswa, sehingga menjadikan fakultas ekonomi kondusif dalam proses belajar mengajar.

3. Drs. Sahabudin Sidiq, MA, selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arah dan bimbingan demi keberhasilan dan selesainya skripsi ini.
4. Segenap staf dan karyawan perpustakaan FE UII atas bantuan dalam mencari buku-buku referensi sehingga diperoleh literature yang memadai untuk penulisan skripsi ini.
5. Seluruh staf dan karyawan FE UII jurusan Ekonomi Pembangunan atas fasilitas dan bantuannya selama ini.
6. Biro Pusat Statistik Yogyakarta yang telah membantu dalam mencari data-data ekonomi selama penulisan skripsi ini.
7. Dwi Agus Sulistiowati,SE atas bantuan dan doanya selama ini sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
8. Sahabat-sahabatku, Sigit “ PRAM” Setiyawan,SE, Mashari “MACAN”,Iqbal atas bantuan dan doanya selama ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini yang telah membantu baik moril maupun spirituil hingga terselesainya skripsi ini.

Penulis dalam skripsi ini sudah berusaha sekuat tenaga mencurahkan segala kemampuan untuk menghasilkan yang terbaik yang bisa diberikan, namun demikian sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang masih perlu diperbaiki. Kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan dari semua pihak demi tercapainya kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya,dan penulis khususnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan bebas plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Berita Acara Ujian.....	v
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar.....	xvi
Daftar Lampiran	xvii
Halaman Abstract.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	15
1.3. Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Manfaat Penelitian.....	16
1.5. Sistematika Penulisan	17

BAB II	TINJAUAN UMUM SUBJEK PENELITIAN.....	20
II.1.	Keadaan Geografis	20
II.2.	Pemerintahan.....	22
II.2.1.	Pemerintahan Daerah	22
II.3.	Penduduk dan Tenaga Kerja	24
II.3.1.	Penduduk	24
II.3.2.	Tenaga Kerja.....	25
II.3.3.	Transmigrasi	26
II.4.	Sosial.....	26
II.4.1.	Pendidikan	26
II.4.2.	Kesehatan	27
II.4.3.	Agama	28
II.4.4.	Kriminalitas dan Peradilan	29
II.4.5	Sosial lainnya.....	30
II.5.	Pertanian	31
II.5.1.	Tanaman Pangan.....	31
II.5.2.	Perkebunan	33
II.5.3.	Kehutanan.....	33
II.5.4.	Peternakan	33
II.5.5.	Perikanan	35
II.6.	Industri, Energy dan Konstruksi.....	36
II.6.1.	Industri.....	36
II.6.2.	Konstruksi.....	37

II.6.3. Listrik dan Air Minum	38
II.7. Perdagangan	40
II.7.1. Perdagangan Dalam Negeri	40
II.8. Perhubungan dan Komunikasi	42
II.8.1. Jalan Raya dan Angkutan Darat	42
II.8.2. Angkutan Udara	43
II.8.3. Perhotelan	44
II.9. Keuangan dan Harga.....	45
II.9.1. Keuangan Daerah.....	45
II.9.2. Bank, Koperasi, Penggadaian dan Penanaman Modal.....	46
II.10. Konsumsi	48
II.11. Pendapatan Regional	51
II.11.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	51
II.11.2. Struktur Ekonomi.....	52
BAB III KAJIAN PUSTAKA	53
III.1. Ulyy Adriyani.....	53
III.2. Samsubar Saleh	54
III.3. Syamsul Amar	56
BAB IV LANDASAN TEORI	57
IV.1. Landasan Teori.....	57
IV.1.1. Pembangunan Ekonomi	57
IV.1.2. Pengertian Pembangunan Ekonomi.....	57

	IV.1.3. Manfaat Pembangunan Ekonomi	65
	IV.2. Distribusi Pendapatan.....	66
	IV.2.1. Teori Kesenjangan.....	72
	IV.2.2. Mydral.....	72
	IV.2.3. Hirschman	73
	IV.2.4. Jeffrey Williamson	73
	IV.2.5. Andre Gunder Frank dan Dos Santos	74
	IV.3. Kemiskinan	75
	IV.3.1. Indikator Kemiskinan	79
BAB V	METODOLOGI PENELITIAN.....	83
	V.1. Objek Penelitian	83
	V.2. Metode dan Jenis Penelitian	83
	V.3. Jenis dan Sumber Data	83
	V.4. Teknis Analisis Data	84
	V.4.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	84
	V.4.2. Indkes Sen	85
	V.5. Koefisien Gini	86
	V.6. Head Count Indek.....	86
	V.7. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Distribusi Pendapatan dan Ttingkat Kemiskinan	87
BAB VI	PEMBAHASAN	89
	VI.1. Pertumbuhan Ekonomi	89
	VI.1.1. Indeks Sen	90

VI.2. Distribusi Pendapatan.....	93
VI.3. Tingkat Kemiskinan	94
VI.4. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Distribusi Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan	95
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN.....	97
VII.1. Kesimpulan.....	97
VII.2. Saran.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Laju Pertumbuhan, Kontribusi dan Andil Menurut Sektor di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002 (%)	10
Tabel I.2.	Laju Pertumbuhan, Kontribusi dan Andil Menurut Sektor di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003 (%)	12
Tabel I.3.	Persentase Penduduk menurut Tipe Daerah Istimewa Yogyakarta 2003 (%)	13
Tabel I.4.	Persentase Pengeluaran Penduduk menurut Kelompok Penduduk dan Angka Gini di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 1999, 2002, dan 2003	14
Tabel IV.1.	Tingkat Konsumsi Beras Per Kapita Sebagai Indikator Kemiskinan (Kilogram)	80
Tabel VI.1.	Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994 – 2003 (%)	89
Tabel VI.2.	Indeks Sen Daerah Istimewa Yogyakarta 1994 – 2003	91
Tabel VI.3.	Indeks Send an PDRB Per Kapita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994 – 2003	92
Tabel VI.4.	Koefisien Gini Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994 – 2003 (%)	93
Tabel VI.5.	Head Count Index Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994 – 2003 (%)	94
Tabel VI.6.	Korelasi Pearson antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Distribusi Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994 – 2003	95

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kurva Lorenz	71
Gambar 2 Lingkaran Kemiskinan Vers Nurks	82

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Produk Domestik Regional Bruto Berdasarkan Harga Konstan 1993 Daerah Istimewa Yogyakarta Dirinci Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1994-2003 (Juta Rupiah)
- Lampiran 2 Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Daerah Istimewa Yogyakarta Dirinci Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1994-2003 (Jiwa)
- Lampiran 3 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Daerah Istimewa Yogyakarta Dirinci Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1994-2003 (Rupiah)
- Lampiran 4 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Berdasarkan Harga Konstan 1993 Daerah Istimewa Yogyakarta Dirinci Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1994-2003 (%)
- Lampiran 5 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994-2003 (%)
- Lampiran 6 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994-2003 (%)
- Lampiran 7 Produk Domestik Regional Bruto Berdasarkan Harga Konstan 1993 Daerah Istimewa Yogyakarta Dirinci Menurut Lapangan Usaha Tahun 1994-2003 (Juta Rupiah)
- Lampiran 8 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Berdasarkan Harga Konstan Daerah Istimewa Yogyakarta Dirinci Menurut Lapangan Usaha Tahun 1994-2003 (%)
- Lampiran 9 Indeks Sen Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994-2003
- Lampiran 10 Perhitungan Koefisien Gini Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994
- Lampiran 11 Perhitungan Koefisien Gini Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1995
- Lampiran 12 Perhitungan Koefisien Gini Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1996

- Lampiran 13 Perhitungan Koefisien Gini Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1997
- Lampiran 14 Perhitungan Koefisien Gini Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1998
- Lampiran 15 Perhitungan Koefisien Gini Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1999
- Lampiran 16 Perhitungan Koefisien Gini Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2000
- Lampiran 17 Perhitungan Koefisien Gini Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001
- Lampiran 18 Perhitungan Koefisien Gini Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002
- Lampiran 19 Perhitungan Koefisien Gini Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003
- Lampiran 20 Koefisien Gini Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994-2003
- Lampiran 21 Grafik Koefisien Gini Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994-2003
- Lampiran 22 Head Count Index Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994-2003
- Lampiran 23 Grafik Jumlah Penduduk Miskin Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994-2003
- Lampiran 24 Grafik Tingkat Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994-2003
- Lampiran 25 Grafik Perubahan Tingkat Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994-2003
- Lampiran 26 Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1993-2002
- Lampiran 27 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Daerah istimewa Yogyakarta 1994-2003
- Lampiran 28 Grafik Pendapatan dan Indeks Sen Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994-2003

- Lampiran 29 Case Processing Summary & Case Summaries
- Lampiran 30 Correlations
- Lampiran 31 Grafik Pertumbuhan Ekonomi, Distribusi Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994-2003

HALAMAN ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1994-2003. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta. Adapun metode yang digunakan adalah indeks sen yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan yang disertai pemerataan dan peningkatan kualitas pembangunan, koefisien gini adalah untuk mengukur distribusi pendapatan, Head count indeks untuk mengukur tingkat kemiskinan. Sedang korelasi pearson dalam program SPSS 12.0 adalah untuk mengetahui hubungan pertumbuhan ekonomi,distribusi pendapatan. dan tingkat kemiskinan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1994-2003 telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang meningkat, kemiskinan yang semakin membaik dan distribusi pendapatan yang semakin merata. Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak signifikan berhubungan dengan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus disertai suatu proses perubahan, yaitu perubahan struktur ekonomi, social, politik dan kebudayaan. Sedangkan pembangunan pada umumnya diartikan sebagai proses yang menghasilkan peningkatan pendapatan perkapita penduduk suatu negara dan jangka panjang dari pengertian tersebut berdampak adanya tiga sifat penting dari pembangunan ekonomi yaitu sebagai : (Arsyad, 1999; 11-12).

1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus
2. Usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita
3. Kenaikan pendapatan perkapita yang berlangsung dalam jangka panjang
4. Perbaikan Sistem kelembagaan di segala bidang (misal: ekonomi, politik, hukum, social dan budaya)

Pertumbuhan ekonomi menjadi orientasi pembangunan, karena diyakini secara otomatis dapat menetes atau mengalir ke bawah (*trickle down effect*) menyebarkan hasil-hasil pembangunan hingga dapat menciptakan berbagai peluang ekonomi guna tercapainya distribusi hasil-hasil pembangunan secara lebih merata.

Jadi pertumbuhan menjadi tujuan akhir bagi proses pembangunan terutama di negara-negara sedang berkembang dalam menyejajarkan diri dengan negara maju.

Perubahan struktur perekonomian yang berlangsung secara bersamaan dengan terjadi peningkatan pendapatan perkapita tentu mengesankan terjadi peningkatan kesejahteraan suatu masyarakat pada suatu daerah tersebut. Namun apabila dikaji lebih jauh meskipun telah terjadi perubahan dan kemajuan yang cukup besar, ternyata perkembangan tersebut masih banyak masalah pembangunan yang belum sepenuhnya dipecahkan dan cenderung semakin parah, beberapa diantaranya adalah masalah kemiskinan, distribusi pendapatan antar golongan penduduk dan kesenjangan pembangunan antar daerah. Pengalaman NSB menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memunculkan permasalahan pengangguran, kemiskinan dan ketidakmerataan. Telah sering terjadi apa yang disebut “ *trickle down effect* ” dari manfaat pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat khususnya golongan miskin. Terjadi kebingungan antara pilihan memperbesar atautkah membagi “kue pertumbuhan” karena adanya *trade off* diantara keduanya dimana pilihan terhadap salah satu akan mengorbankan pilihan yang lain. (Kuncoro, 2003;7-11).

Memburuknya ketidakmerataan memperparah masalah kemiskinan maupun pengangguran. Meskipun menurut banyak penelitian, ketidakmerataan ini justru merupakan suatu syarat yang diperlukan (*necessary condition*) untuk menciptakan pertumbuhan tinggi yang diperlukan dalam permulaan proses pembangunan.

Harry Johnson mengemukakan :

...pencegahan efek social yang tidak dikehendaki sebagai akibat mekanisme pasar adalah erupakan barang luks yang tidak sepatasnya dinikmati oleh negara-negara yang sedang berkembang seandainya mereka serius untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada dasarnya kemungkinan besar akan terjadi pertentangan antara pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pemerataan pendapatan; dan suatu negara miskin yang sangat ingin untuk berkembang sebaiknya dinasehatkan untuk tidak begitu menghiraukan aspek pembagian pendapatan ini (Arief, 1997:4).

Hal ini didukung dengan pernyataan Gustaf F. Papanek sebagai berikut :

Masalah ketidakmerataan pendapatan memang ada tetapi urgensinya hendaklah diletakkan dalam suatu perspektif waktu. Yang penting ialah bahwa ketidakmerataan pendapatan akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang akan memungkinkan timbulnya perbaikan dalam tingkat hidup golongan miskin (Arief,1977:5).

Sedangkan Profesor Kuznets mengemukakan :

Bahwa pada tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan atau kesejahteraan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya hal itu akan membaik (Todaro,2000: 206-207).

Salah satu fenomena pertumbuhan ekonomi yang sangat menonjol adalah apa yang dialami oleh negara-negara di Asia Timur (Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, Singapura, Thailand, Malaysia dan Indonesia dalam publikasi Bank Dunia tahun 1993 yang berjudul *The East Asia Miracle: Economic Growth and Public Policy*, dijuluki sebagai *High Performing Asian Economies*), yang selama pertengahan 1960-an sampai awal 1990-an mengalami rata-rata tingkat pertumbuhan GDP riil yang tinggi sekaligus mampu melakukan pemerataan distribusi pendapatan baik dalam hal alokasi sumber daya maupun hasil dari pertumbuhan itu sendiri. Dimana hal ini bertentangan dengan hipotesis U terbalik yang dikemukakan oleh Kuznets (1955) yang mana pada tahap awal pembangunan akan ditandai dengan adanya tingkat pertumbuhan yang tinggi disertai tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi pula (Kuncoro, 2003; 105).

Beberapa studi mengenai pertumbuhan ekonomi memberikan kesimpulan yang beragam. Vinod Ahuja, Benu Bidani, Francisco Ferreira dan Michael Walton mengenai kemiskinan dan ketidakmerataan di Asia Tenggara menyimpulkan bahwa kemajuan dan laju pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi kaum miskin (www.worldbank.org). Studi yang dilakukan Narayan dkk (2000) dalam *Voice of The Poor: Can Anyone Hear Us?* mengungkapkan bahwa peningkatan pendapatan merupakan salah satu bagian dari pengurangan kemiskinan (The World Bank, 2001:XXX).

Kesenjangan yang lebar dalam masyarakat di negara sedang berkembang merupakan sesuatu yang beresiko. Kesenjangan ekonomi antar kelas dalam masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan yang berpendapatan rendah di negara sedang berkembang seperti Indonesia dapat merembet kepada masalah kesejahteraan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk itu orientasi pembangunan pada pertumbuhan perlu dikoreksi, karena dapat menyembunyikan keadaan mayoritas kelas bawah yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan suatu ledakan social.

Di Indonesia, pembangunan ekonomi selama tiga dekade dalam pemerintahan orde baru Soeharto, berhasil menakkan ranking dari negara miskin berpendapatan rendah pada pertengahan 1960-an menjadi negara menengah berpendapatan rendah pada awal 1990-an. Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun lebih dari 7% selama periode 1965-1997. Suksesnya program Keluarga Berencana (KB) yang dimulai sejak awal 1970-an, membuat pertumbuhan penduduk selama 1965-1997 rata-rata per tahun 2%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih besar daripada pertumbuhan penduduknya mengakibatkan terjadinya peningkatan GNP per kapita (Wie,2001:165).

Hal yang menarik perhatian dari hasil pemerintahan Orde Baru adalah sukses mengkombinasikan pertumbuhan ekonomi tinggi dengan pemerataan, terkait dengan masalah kemiskinan absolut, dan distribusi pendapatan. Kemiskinan menurun dari 40% jumlah penduduk (sekitar 54 juta penduduk) pada tahun 1976

menjadi 11% (23 juta penduduk) pada tahun 1996. Studi mengenai kemiskinan yang dilakukan Bank Dunia terhadap pembangunan di beberapa negara menyimpulkan bahwa selama periode 1970-1987 Indonesia berhasil dalam mengurangi kemiskinan Absolut (Wie, 2001: 171). Meskipun demikian, kemiskinan di Indonesia sangat sensitive terhadap pengukuran yang dipakai. Garis kemiskinan yang digunakan lebih rendah daripada yang digunakan oleh negara lain. Laporan Bank Dunia (1990) menyebutkan bahwa mereka yang tidak miskin sebenarnya sangat berdekatan dengan posisi “hampir miskin”. Sebagai contoh dengan menaikkan garis kemiskinan sebesar 10% akan meningkatkan jumlah yang tergolong miskin dengan persentase yang sama (Hill, 1996:277).

Studi terbaru mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia yang dilakukan oleh Simarto (2002) dari SMERU *Research Institute* menemukan bahwa (Kuncoro, 2003:138):

1. Terdapat hubungan negatif yang sangat kuat antara pertumbuhan dan kemiskinan
2. Pertumbuhan tidak mengurangi kemiskinan secara permanen.
3. Pertumbuhan secara kontemporer (dalam waktu yang sama) dapat mengurangi kemiskinan.
4. Walaupun terjadi pertumbuhan dalam jangka panjang, namun tidak mengurangi kemiskinan secara permanen.
5. Pengurangan ketimpangan mengurangi kemiskinan secara signifikan.

6. Memberikan hak atas property dan memberikan akses terhadap kapital untuk golongan masyarakat miskin sehingga dapat mengurangi kesenjangan, merangsang pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan.

Sedangkan studi Strauss, et al. (2002) yang disponsori oleh World Bank menyimpulkan bahwa kesejahteraan individu setelah tiga tahun (1997-2000) terkena krisis nampak tidak lebih buruk jika dibandingkan sebelum krisis pada akhir tahun 1997 dilihat dari berbagai dimensi standart hidup masyarakat. Sebagian masyarakat justru menjadi lebih baik ,paling tidak terlihat dari tingkat kemiskinan yang lebih rendah dan pengeluaran per kapita yang lebih tinggi (Kuncoro,2003: 139-143).

Usaha pembangunan yang dilakukan oleh negara maju maupun negara sedang berkembang pada dasarnya mempunyai tujuan berupa terciptanya masyarakat adil dan makmur. (Todaro, 2000;81). Dalam pelaksanaannya pembangunan perlu memperhatikan orientasi pembangunan guna mencapai tujuan pembangunan. Apakah berorientasi pada pemerataan ataukah pertumbuhan ekonomi. Dimana pada negara sedang berkembang seperti Indonesia kedua orientasi tersebut saling bertentangan. Pilihan terhadap salah satu akan mengorbankan pilihan yang lain.

Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti dari permasalahan pembangunan, walaupun titik perhatian utama pada ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Berhasil tidaknya pembangunan seringkali dilihat dari pendapatan perkapita. Meski indicator ini kurang begitu memuaskan karena tidak dapat menunjukkan bagaimana dampak pembangunan terhadap lingkungan, sekaligus bagaimana pendapatan nasional didistribusikan dan siapa yang sebetulnya menikmati pertumbuhan ekonomi. Karena bisa terjadi pertumbuhan pendapatan nasional dan pendapatan nasional perkapita menyembunyikan kenyataan bahwa posisi ekonomi golongan miskin tidak bertambah baik atau malah bertambah buruk bersamaan dengan bertambah lebarnya jurang perbedaan di antara golongan kaya dan yang miskin. Adanya kelemahan ukuran pertumbuhan ekonomi yang menggunakan pendapatan perkapita, maka digunakan indeks pembangunan yang lain seperti Indeks Sen, Karena indeks ini mencakup pendapatan per kapita riil dan indikator ketidakmerataan sekaligus yaitu Koefisien Gini.

Adanya ketidakmerataan dalam pembangunan mempunyai resiko besar dalam masyarakat ke depannya. Karena dapat memicu masalah sosial seperti kemiskinan (tingkat kemiskinan di gambarkan dengan *Head Count Index*) yang bermuara pada ledakan sosial. Untuk itu pendapatan harus terdistribusi merata antar lapisan masyarakat, antar daerah (desa-kota), antar wilayah supaya terwujud keadilan dalam mendapatkan kebutuhan dasar yang seharusnya menjadi haknya sebagai manusia dan warga negara. Kesejahteraan yang dicita-citakan tercapai sekaligus bisa mengatasi masalah kemiskinan baik absolut maupun relatif.

Pembangunan disadari bukan semata-mata sebagai peningkatan pendapatan perkapita melainkan dengan adanya pembangunan terjadi peningkatan kualitas hidup (*quality of life*), pertumbuhan ekonomi, perbaikan distribusi pendapatan, rendahnya tingkat kemiskinan, pengangguran, berkurangnya masalah social, maupun minimalnya kerusakan lingkungan, sehingga pembangunan ekonomi berkelanjutan terlaksana guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan keadilan pada setiap generasi.

Dengan menggunakan data dari 50 negara berkembang dalam penelitian yang dilakukan untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh dalam distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan, Richard H Adam Jr (2003) mengemukakan bahwa pertumbuhan menunjukkan pengaruh yang berarti bagi penurunan tingkat kemiskinan pada pembangunan dunia, dimana pertumbuhan menunjukkan bahwa secara rata-rata setiap terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 10% mengakibatkan penurunan proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 25,9% ([www. Worldbank.com](http://www.Worldbank.com)).

Tidak berbeda jauh, pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibanding pertumbuhan sebelumnya yakni 3,38 persen menjadi 3,29 persen tetapi belum dapat melampaui pertumbuhan tahun 2000 sebesar 4,01 persen. Peningkatan laju pertumbuhan 0,09 point tersebut didukung oleh peningkatan beberapa kinerja sektor ekonomi, diantaranya sektor bangunan dan

sektor keuangan. Kinerja positif sektor bangunan disebabkan oleh upaya pemerintah untuk menggairahkan sektor riil dengan penurunan suku bunga kredit dan promosi investasi. Sedangkan kegairahan sektor keuangan karena semakin pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di DIY khususnya.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan, Kontribusi dan Andil menurut Sektor
Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002 (%)

Sektor	Laju Pertumbuhan	Kontribusi	Andil
1. Pertanian	-5,57	16,59	0,95
2. Pertambangan dan Penggalian	0,17	1,45	0,02
3. Industri	4,08	15,61	0,64
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	3,95	0,96	0,04
5. Bangunan	10,35	7,38	0,76
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,95	18,36	0,36
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5,02	11,17	0,61
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	11,03	10,38	1,14
9. Jasa – Jasa	4,21	18,09	0,76
PDRB	3,38	100,00	3,38

Sumber : BPS Propinsi DIY

Kendati pertumbuhan ekonomi belum mampu mencapai target 4 persen dalam perencanaan pembangunan daerah, namun sudah tampak adanya peningkatan yang cukup signifikan. Tabel diatas menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi dari sektor bangunan dan keuangan. Hal itu menarik pertumbuhan total dari kejatuhan karena turunnya sektor pertanian sebesar 5,75 persen.

Selama ini *share* sektor pertanian merupakan yang terbesar dibanding sektor-sektor lain dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDRB). Bahkan pada tahun 1999 dan 2000 mencapai lebih dari 20 persen. Tetapi mulai tahun 2001 turun menjadi 18,9 persen dan 16,59 persen pada tahun 2002, karena kinerja sektor lain yang semakin baik.

Fenomena tersebut tampak pada tabel yang menunjukkan andil terbesar pada tahun 2002 adalah dari sektor keuangan, yakni 1,14 persen. Bangunan, jasa-jasa, industri dan pengangkutan memberikan andil yang cukup besar yakni -0,95 persen.

Sedangkan tahun 2003 pertumbuhan ekonomi di DIY mencapai 4,09 persen, lebih tinggi 0,07 poin dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya yang sebesar 4,02 persen. Peningkatan ini diantaranya karena melajunya pertumbuhan sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman bahan makanan, sektor bangunan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran khususnya subsektor perdagangan. PDRB perkapita yang merupakan proksi dari pendapatan perkapita mengalami kenaikan dari 5,28 juta rupiah menjadi 5,91 juta rupiah. Diharapkan dengan peningkatan PDRB perkapita ini akan meningkatkan daya beli masyarakat.

Tabel 1.2

Laju Pertumbuhan, Kontribusi dan Andil menurut Sektor
Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003 (%)

Sektor	Laju Pertumbuhan	Kontribusi	Andil
1. Pertanian	4,85	16,54	0,80
2. Pertambangan dan Penggalian	0,94	1,41	0,01
3. Industri	2,38	14,46	0,34
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	5,72	0,92	0,05
5. Bangunan	10,32	8,44	0,87
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,73	19,31	1,11
7. Pengangkutan dan Komunikasi	2,33	10,48	0,24
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,98	10,97	0,55
9. Jasa – Jasa	1,42	17,47	0,25
PDRB	4,09	100,00	4,09

Sumber : BPS Propinsi DIY

Sedangkan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan rakyat adalah jumlah dan persentase penduduk miskin. Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin memberi

indikasi menurunnya pendapatan penduduk. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makan setara 2.100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang paling esensial yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi dan aneka barang maupun jasa lainnya.

Penduduk miskin lebih banyak ditemukan di wilayah pedesaan daripada di perkotaan. Pada 2003 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditemukan sebesar 19,86 persen penduduk miskin. Di wilayah pedesaan ditemukan sebanyak 24,48 persen sedangkan di wilayah perkotaan hanya meliputi 16,44 persen.

Tabel 1.3

Persentase Penduduk menurut Tipe Daerah dan Status Sosial di
Daerah Istimewa Yogyakarta, 2003 (%)

Type Daerah	Status Sosial	
	Penduduk Tidak Miskin	Penduduk Miskin
Kota	83,56	16,44
Desa	75,52	24,48
Kota + Desa	80,14	19,86

Sumber : Penduduk Fakir Miskin Indonesia 2003, BPS

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara tidak hanya mengejar peningkatan pendapatan semata tetapi juga harus memperhatikan pemerataan pendapatan masyarakatnya. Karena ketimpangan dalam hal distribusi pendapatan tidak hanya akan menciptakan kemiskinan tetapi juga dapat menimbulkan masalah social. Oleh karena itulah pembangunan yang dilakukan diharapkan tidak hanya untuk mencapai target tingkat pertumbuhan tetapi juga memperhatikan pemerataan bagi masyarakat.

Untuk melihat tingkat ketimpangan pendapatan penduduk dapat digunakan kriteria ketimpangan dari Bank Dunia, yaitu dengan melihat persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah.

Tabel 1.4
 Persentase Pengeluaran Penduduk menurut Kelompok Penduduk
 dan Angka Gini di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 1999, 2002 dan 2003

Tahun	40% Terendah	40% Menengah	20% Tertinggi	Angka Gini
1999	20,60	35,30	44,11	0,337
2002	19,03	34,37	46,51	0,367
2003	19,59	35,66	44,75	0,344

Sumber : Susenas 1999, 2002, 2003

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa menurunnya persentase pengeluaran penduduk berpendapatan rendah di Yogyakarta diikuti dengan meningkatnya koefisien gini, yaitu dari 0,367 pada 2002 turun menjadi 0,344 pada tahun 2003.

Fenomena ini menunjukkan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar kelompok penduduk.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang sangat besar dalam usaha mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata dan dalam usaha penurunan tingkat kemiskinan, namun yang perlu dicatat bahwa kondisi ini mensyaratkan kondisi yang mendukung dapat berjalan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis akan mengadakan penelitian dengan mengambil judul "PERTUMBUHAN EKONOMI, DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN TINGKAT KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SELAMA PERIODE 1994-2003".

I.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi di DIY 1994-2003?
2. Bagaimana perkembangan distribusi pendapatan di DIY 1994-2003?
3. Bagaimana perkembangan tingkat kemiskinan di DIY 1994-2003?
4. Bagaimana hubungan pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan di DIY 1994-2003?

I.3. Tujuan Penelitian

1. Mengukur pertumbuhan ekonomi di DIY 1994-2003?
2. Mengukur distribusi pendapatan di DIY 1994-2003?
3. Mengukur tingkat kemiskinan di DIY 1994-2003?

4. Mengetahui hubungan pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan di DIY 1994-2003?

I.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilaksanakan :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan ekonomi pembangunan fakultas ekonomi “UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA” Yogyakarta

2. Bagi Pemerintah

Sekiranya hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan pemerintah dalam menentukan pola kebijakan dalam proses pembangunan

3. Bagi Pembaca

Sebagai informasi yang sekiranya dapat dijadikan sebagai pandangan umum terhadap proses pembangunan dan juga dimungkinkan untuk dijadikan informasi bagi penelitian lainnya.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan.

Berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Umum Subyek Penelitian

Berisi uraian atau diskripsi atau gambaran secara umum atas subyek penelitian. Deskripsi dilakukan dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang bersifat umum sebagai wacana pemahaman secara makro yang berkaitan dengan penelitian. Sumber bahan rujukan memanfaatkan sumber data dan publikasi ilmiah: data publikasi Biro Pusat Statistik (BPS), instansi yang berkompeten, jurnal dan berbagai sumber lainnya yang mempunyai rujukan yang jelas.

BAB III : Kajian Pustaka

Berisi pendokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dalam masalah atau area yang sama. Dari usaha atau proses ini ditemukan kelemahan atau kekurangan pada penelitian sebelumnya, sehingga dapat dijelaskan dimana letak hubungan, perbedaan maupun posisi penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang lain sekaligus dihindari duplikasi sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan penelitian.

BAB IV : Landasan Teori dan Hipotesis

Berisi dua bagian : *pertama*, mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang diteliti. Landasan teori merupakan cara peneliti menteorikan hubungan variabel yang terlibat dalam permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut. *Kedua*, hipotesis penelitian sebenarnya secara implisit sudah muncul pada landasan teori, namun demikian sifatnya belum formal sehingga perlu dibakukan sebagai pernyataan yang siap untuk diuji.

BAB V : Metode Penelitian

Berisi uraian tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB VI : Analisis dan Pembahasan

Berisi interpretasi berbagai hasil statistik yang didapat sebagai temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisis statistik. Bila ternyata hasil penelitian secara keseluruhan atau sebagian tidak sesuai dengan teori atau harapan umum, maka peneliti harus bisa memberikan penjelasan bagaimana hal tersebut bisa terjadi.

BAB VII: Kesimpulan dan Implikasi

Berisi *kesimpulan* yang diturunkan dari analisis penelitian dan juga telah dianalisis pada bagian sebelumnya. Simpulan ini juga harus

telah menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah. *implikasi* yang muncul dari penelitian tersebut sebagai masukan pihak terkait, sehingga dari sini dapat ditarik benang merah apa implikasi teoritis penelitian ini. Jika penelitian yang dilakukan merupakan penelitian terapan, maka implikasi praktis apa yang dimunculkan sebagai masukan bagi pihak terkait.

- **Daftar Pustaka**
- **Lampiran**

BAB II

TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

II.1. Keadaan Geografis

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu propinsi dari 30 propinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau jawa bagian tengah. Daerah istimewa yogyakarta dibagian selatan dibatasi oleh lautan Indonesia, sedangkan dibagian timur laut, tenggara, dan barat laut dibatasi oleh provinsi jawa tengah yang meliputi:

1. Kabupaten Klaten disebelah Timur Laut.
2. Kabupaten Wonogiri disebelah Tenggara.
3. Kabupaten Purworejo disebelah Barat.
4. Kabupaten Magelang disebelah Barat Laut.

Berdasarkan satuan fisiografis, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari :

- Pegunungan Selatan,
 - luas : $\pm 1.656,25 \text{ km}^2$
 - Ketinggian : 150 – 700 m
- Gunung Berapi Merapi,
 - luas : $\pm 582,81 \text{ km}^2$
 - Ketinggian : 80 – 2.11 m
- Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo,
 - luas : $\pm 215,62 \text{ km}^2$
 - ketinggian : 0 – 80 m
- Pegunungan Kulonprogo dan Dataran Rendah Selatan,

- luas : $\pm 706,25 \text{ km}^2$
- Ketinggian : 0 – 572 m

Posisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak antara $7^{\circ}.33'$ sampai $8^{\circ}.12'$ Lintang Selatan dan Garis Bujur Timur $110^{\circ}.00'$ sampai $110^{\circ}.50'$. Luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah $3.185,80 \text{ km}^2$ atau $0,17\%$ luas Indonesia ($1.890.754 \text{ km}^2$), merupakan propinsi terkecil setelah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi atas empat kabupaten dan satu kota yaitu:

1. Kabupaten Kulon Progo memiliki wilayah seluas $586,28 \text{ km}^2$ ($18,40 \%$)
2. Kabupaten Bantul memiliki wilayah seluas $506,85 \text{ km}^2$ ($15,91 \%$)
3. Kabupaten Gunung Kidul memiliki wilayah seluas $1.485,36 \text{ km}^2$ ($46,63 \%$)
4. Kabupaten Sleman memiliki wilayah seluas $574,82 \text{ km}^2$ ($18,04 \%$)
5. Kota Yogyakarta memiliki wilayah seluas $32,50 \text{ km}^2$ ($1,02 \%$)

Berdasarkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional, dari $3.185,80 \text{ km}^2$ luas Daerah Istimewa Yogyakarta, $35,94 \%$ merupakan jenis tanah Lithosol, $27,45 \%$ Regosol, $11,94 \%$ Lathosol, $10,45 \%$ Grumusol, $10,27 \%$ Mediteran, $2,24 \%$ Alluvial dan $1,74 \%$ adalah tanah jenis Rensina.

Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada ketinggian antara $100\text{m} - 499\text{m}$ dari permukaan laut tercatat sebesar $63,18 \%$, ketinggian kurang dari 100m sebesar $31,56 \%$, ketinggian antara $500\text{m} - 999\text{m}$ sebesar $4,79 \%$ dan ketinggian diatas 1000m sebesar $0,47 \%$. Daerah Istimewa Yogyakarta beriklim tropis dengan curah hujan berkisar antara $7\text{mm} - 380\text{mm}$ yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan.

II.2. Pemerintahan

II.2.1. Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah bertanggungjawab sebagai eksekutif dan DPRD bertanggungjawab sebagai legislatif. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Tingkat I dikepalai oleh seorang Gubernur Kepala Daerah dengan ibukota propinsi adalah Kota Yogyakarta. Dalam melaksanakan tugasnya, terdapat tiga organisasi perangkat staf pemerintah daerah, yaitu Sekretaris Daerah (Setda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan Badan Pengawas Daerah.

Sekretaris Daerah membawahi empat Asisten yaitu:

1. Asisten Tatapraja,
(Asisten Sekwilda I)
2. Asisten Ekonomi Pembangunan,
(Asisten Sekwilda II)
3. Asisten Kesejahteraan Masyarakat,
(Asisten Sekwilda III)
4. Asisten Administrasi,
(Asisten Sekwilda IV)

Empat Asisten tersebut membawahi lima biro:

1. Biro Pemerintahan
2. Biro Hukum
3. Biro Keuangan

4. Biro Umum

5. Biro Organisasi dan Tatalaksana

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bertugas mengkoordinir dan mengintegrasikan usaha, penyusunan rencana, dan program kerja pembangunan daerah.

Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan umum atas jalannya roda pemerintahan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dan 4 kabupaten dan 1 kota dengan 78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa yaitu :

1. Kabupaten Kulonprogo terdiri dari] 2 kecamatan dan 88 kelurahan/desa
2. Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan dan 75 kelurahan/desa
3. Kabupaten Gunungkidul terdiri dan 18 kecamatan dan 144 kelurahan/desa
4. Kabupaten Sleman lerdin dari 17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa
5. Kota Yogyakarta terdin dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan/desa

II.2.2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Propinsi sebanyak 55 orang terdiri dari fraksi PDI-P 32,73 persen, Kebangkitan Bangsa 16,36 persen, PAN 14,55 persen, Golkar dan Persatuan masing-masing 12,73 persen, dan TNI/POLRI 10,90 persen.

Berdasarkan komisi anggota dewan terdiri dari komisi Pcmerintahan 25,49 persen, komisi Ekonomi 19,61 persen, komisi Keuangan dan komisi

Pembangunan masing-masing 15,69 persen, serta komisi Kesejahteraan Rakyat 23,53 persen (tidak termasuk Pimpinan Dewan). Jumlah anggota DPRD Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta masing-masing 40 orang, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Sleman masing-masing 45 orang. Pada tahun 2003 tercatat jumlah keputusan yang ditetapkan DPRD Propinsi sebanyak 871 keputusan dan DPRD Kabupaten/Kota se-Propinsi D.I. Yogyakarta sebanyak 474.

II.3. Penduduk dan Tenaga Kerja

II.3.1. Penduduk

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2003, jumlah penduduk D.I. Yogyakarta tercatat 3.207.385 jiwa, dengan persentase jumlah penduduk perempuan 50,26 persen dan penduduk laki-laki 49,74 persen. Menurut daerah, persentase penduduk kota mencapai 57,52 persen dan penduduk desa mencapai 42,48 persen.

Pertumbuhan penduduk pada tahun 2003 adalah 1,61 persen, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Sleman terlihat memiliki angka pertumbuhan di atas angka propinsi, yakni masing-masing 2,48 persen, 1,82 persen dan 1,79 persen.

Dengan luas wilayah 3.185,80 km², kepadatan penduduk di D.I. Yogyakarta 1.007 jiwa per km². Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta yakni 12.029 jiwa per km² dengan luas wilayah hanya sekitar 1 persen dari luas Propinsi D.I. Yogyakarta. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul yang memiliki luas wilayah mencapai 46,63 persen dihuni rata-rata 462 jiwa per km².

Komposisi kelompok umur penduduk D.I. Yogyakarta didominasi oleh kelompok usia dewasa yaitu umur 20-24 tahun sebesar 10,53 persen dan kelompok umur lanjut usia yaitu umur 60 tahun ke atas sebesar 13,52 persen. Besarnya proporsi mereka yang berusia lanjut mengisyaratkan tingginya usia harapan hidup penduduk DIY.

II.3.2. Tenaga Kerja

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Propinsi DIY pada tahun 2003 didukung oleh 90.441 orang pegawai negeri sipil. Ditinjau menurut level pemerintahan, pegawai

Pemerintahan tersebar pada 5 kabupaten/kota di DIY. Menurut golongan dari total PNS di DIY, 1,91 persen menduduki golongan I, golongan II sebesar 23,69 persen, 54,71 persen menduduki golongan III, dan selebihnya golongan IV sebesar 19,69 persen.

Gambaran tenaga kerja di sektor swasta berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mencatat jumlah pendaftar pencari kerja pada tahun 2003 sebanyak 94.881 orang, menurun sekitar 11,26 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 106.923 orang. Mereka terdiri dari 52,17 persen laki-laki dan 47,83 persen perempuan. Dari jumlah tersebut 58,42 persen berpendidikan SLTA, 34,95 persen Diploma, Sarjana Muda dan Sarjana, serta 5,46 persen adalah SLTP dan sisanya 1,17 persen berpendidikan SD. Persentase lowongan pekerjaan yang tersedia dan penempatan masing-masing adalah 14,01 persen dan 12,37 persen dari total pendaftar/pencari kerja.

Berdasarkan hasil Susenas 2003, persentase penduduk DIY umur 10 tahun ke atas menurut kegiatan adalah 63,84 persen merupakan angkatan kerja (58,63 persen bekerja dan 5,21 persen mencari pekerjaan), sedangkan sisanya sebesar 36,16 persen merupakan bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya masing-masing adalah 20,20 persen, 11,27 persen, dan 4,69 persen). Sedangkan berdasarkan lapangan usaha utama, penduduk yang bekerja bergerak pada sektor pertanian 37,44 persen, perdagangan 19,75 persen, jasa 17,15 persen, industri 12,18 persen dan sisanya 13,48 persen di sektor-sektor lainnya.

II.3.3. Transmigrasi

Sebagai upaya melakukan pemerataan penyebaran penduduk antar wilayah di Indonesia, pemerintah melakukan transmigrasi penduduk. Jumlah transmigran dari DIY pada tahun 2003 tercatat sebanyak 425 KK atau sebanyak 1.519 jiwa. Jumlah transmigran terbanyak berasal dari Kabupaten Bantul serta daerah penempatan terbanyak adalah Propinsi Kalimantan Timur.

II. 4. Sosial

II.4.1. Pendidikan

Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tingginya permintaan jasa pendidikan menuntut tersedianya penyelenggara pendidikan yang makin bermutu. Secara nasional, pendidikan diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta.

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), pada tahun 2003 memiliki 2.228 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 308.808 anak dan diasuh oleh 20.002

guru. Untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni SLTP tercatat sebanyak 511 sekolah dengan 143.003 anak didik yang diasuh oleh 14.120 orang guru.

Untuk jenjang Sekolah Menengah Umum, tercatat sebanyak 8.201 orang guru yang mengajar 74.047 siswa yang tersebar pada 222 sekolah. Adapun untuk tingkat Sekolah Menengah Kejuruan terdapat 147 unit sekolah dengan 59.598 siswa yang diajar oleh 6.260 orang guru.

Pada jenjang perguruan tinggi negeri, Propinsi D.I. Yogyakarta memiliki Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga, Institut Seni Indonesia (ISI), Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan Akademi Teknik Kulit (ATK) dengan jumlah mahasiswa keseluruhan sebanyak 83.427 orang atau naik 0,51 persen dibandingkan tahun 2002, yang diajar 3.919 dosen tetap dan 1.383 dosen tidak tetap.

Adapun jumlah perguruan tinggi swasta (PTS) tercatat sebanyak 105 institusi dengan rincian 46 akademi, 31 sekolah tinggi, 18 universitas serta masing-masing 6 politeknik dan 4 institut yang diasuh oleh 10.473 orang dosen. Jumlah mahasiswa yang mendaftar pada PTS tahun 2003 sebanyak 105.165 orang atau turun 16,15 persen dan diterima sebanyak 47.530 orang atau naik 10,08 persen dari tahun sebelumnya.

II.4.2. Kesehatan

Untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk, pemerintah berupaya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan di serial tenaga kesehatan yang memadai baik kualitas maupun kuantitas. Upaya ini diarahkan agar tempat

pelayanan kesehatan mudah dikunjungi dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Pada tahun 2003 sarana kesehatan yang tersedia di D.I. Yogyakarta sebanyak 35 rumah sakit, 25 rumah sakit bersalin/rumah bersalin, 58 poliklinik/balai pengobatan dan 571 puskesmas. Sedangkan praktek dokter dan bidan, tercatat bahwa tahun 2002 masing-masing sebanyak 689 orang dan 546 orang.

Untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, pemerintah mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) dengan memberikan sarana pelayanan dan prasarana yang memadai. Hal ini memperoleh respon baik dari masyarakat yang tercermin dengan tingginya pencapaian akseptor aktif, dan tahun 2003 tercatat mencapai 394.589 orang dari target sebanyak 392.959 orang atau 100,41 persen dari target. Lebih sepertiga dan akseptor aktif (37,19 persen) memilih suntik, disusul 31,84 persen menggunakan IUD serta 13,48 persen memakai pil dan selebihnya 17,49 persen menggunakan alat kontrasepsi lainnya

II.4.3. Agama

Dari sekitar 3.394.535 orang pemeluk agama, agama Islam merupakan agama yang dominan dipeluk yakni mencapai 91,75 persen. Disusul oleh agama Katholik 4,98 persen, Kristen 2,95 persen, Hindu 0,18 persen, dan Budha 0,14 persen. Sejalan dengan komposisi di atas, jumlah tempat peribadatan yang tersebar di DIY juga didominasi oleh tempat ibadah umat Islam berupa mesjid, mushola dan langgar yang tercatat sebanyak 11.324 unit. Kemudian rumah

ibadah Kristen dan Katholik masing-masing 218 dan 137 unit serta tempat ibadat umat Hindu dan Budha masing-masing 22 dan 24 unit.

Jamaah haji dan D.I Yogyakarta yang berangkat pada awal tahun 2004M/1424H sebanyak 2.463 orang atau naik sebesar 10,10 persen dibandingkan dengan awal tahun 2003M/1423H yang tercatat sebesar 2.237 orang. Berdasarkan asal jamaah, sebagian besar dari Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta masing-masing sebesar 38,81 persen, 26,72 persen dan 24,56 persen dari keseluruhan jamaah, sedangkan sisanya 5,24 persen dan 4,67 persen berasal dari Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul.

II.4.4. Kriminalitas dan Peradilan

Kriminalitas menggambarkan terjadinya ketimpangan kehidupan sosial di masyarakat, sekaligus merupakan fenomena sosial yang memerlukan penanganan yang serius. Banyaknya perkara kriminal yang masuk di Kejaksaan negeri pada tahun 2003 tercatat sebanyak 1.313 perkara, yang sebagian besar (928 perkara) merupakan kriminalitas biasa. Disusul oleh perkara narkoba sebanyak 133 kasus, korupsi 6 kasus dan perkara lainnya sebanyak 236 kasus.

Selanjutnya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan pada tahun 2003 tercatat 1 061 orang yang terdiri dari narapidana sebanyak 598 orang, tahanan 217 orang dan titipan 246 orang. Sebagian besar penghuni lembaga pemasyarakatan adalah mereka yang tersangkut perkara narkoba sebanyak 268 orang, psikotropika 146 orang dan kasus pencurian sebanyak 205 orang.

II.4.5. Sosial Lainnya

Selama tahun 2003, Propinsi D.I. Yogyakarta mengalami 5 kejadian bencana alam dengan rincian tiga kali tanah longsor, dan dua kali angin topan. Peristiwa-peristiwa tersebut menimpa 320 KK yang menyebabkan 187 korban meninggal, serta kerugian material berupa 26 unit rumah rusak. Sedangkan kasus kebakaran pada tahun 2003 tercatat 98 kali atau turun sebesar 4,85 persen dari tahun sebelumnya.

Persoalan lainnya dibidang sosial adalah besarnya para penyandang masalah sosial. Pada tahun 2003 tercatat sebanyak 226.009 penduduk yang dikategorikan memiliki masalah sosial. Sebagian besar, yakni 81,33 persen merupakan fakir miskin, 6,32 persen anak terlantar, dan sisanya 12,35 persen adalah anak nakal, anak jalanan, anak balita terlantar, gelandangan, wanita tuna susila, korban narkoba, eks napi, wanita rentan masalah sosial, dan keluarga dengan rumah tak layak huni. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya perhatian lebih terhadap anak-anak dan wanita yang menjadi korban masalah sosial dalam lingkungannya.

Penduduk menurut tahapan kesejahteraan, dari seluruh penduduk D.I. Yogyakarta tercatat bahwa kelompok pra sejahtera 18,82 persen, Sejahtera I 27,70 persen, Sejahtera II 26,22 persen, Sejahtera III 22,37 persen, dan Sejahtera III plus 4,89 persen.

Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan dan Kesos, tercatat bahwa pada tahun 2003 di D.I. Yogyakarta jumlah fasilitas sosial seperti Panti Asuhan tercatat sebanyak 63 unit dengan anak asuh sebanyak 2.519 orang, Panti Wreda

sebanyak 5 unit dengan penghuni 248 orang, Kelompok Bermain sebanyak 42 unit, hampir dua kali lipat dari tahun sebetumnya, dan Tempat Penitipan Anak sebanyak 9 unit.

Perpustakaan sebagai salah satu sarana mendapatkan informasi tercatat sebanyak 3.219 unit, yang sebagian besar merupakan perpustakaan sekolah yaitu 84,96 persen, sedangkan sisanya perpustakaan desa, perpustakaan departemen, dan perpustakaan umum masing-masing sebesar 13,61 persen, 1,24 persen, dan 0,19 persen.

Permohonan sertifikat sebagai bukti hak milik pada tahun 2003 mencapai 43.636 permohonan atau mengalami penurunan sebesar 10,71 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan total penerbitan sertifikat sampai akhir tahun 2003 mencapai 962.412 sertifikat.

II. 5. Pertanian

II.5.1. Tanaman Pangan

Tanaman pangan meliputi komoditas padi, palawija serta hortikultura. Tanaman palawija terdiri dari komoditas jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedelai serta kacang hijau. Adapun hortikultura terdiri dari komoditas sayur-sayuran, buah-buahan, serta tanaman hias. Data tanaman hias tidak disajikan karena pengumpulan datanya tidak rutin setiap tahun.

Pada tahun 2003, produksi padi tercatat sebesar 652.280 ton (mengalami penurunan sebesar 0,20 persen dari tahun 2002) dengan rincian 80,57 persen merupakan padi sawah dan 19,43 persen padi ladang. Dengan luas panen masing-

masing sebesar 94.629 ha dan 36.052 ha diperoleh angka produktivitas sebesar 5,55 ton per ha untuk padi sawah dan 3,52 ton per ha untuk padi ladang.

Produksi palawija didominasi oleh komoditas ketela pohon sebesar 764.409 ton, kemudian jagung sebesar 204.129 ton serta kacang tanah dan kacang kedelai masing-masing 57.767 ton dan 35.562 ton. Adapun ketela rambat dan kacang hijau relatif kecil masing-masing 7.578 ton dan 563 ton. Komoditas yang mengalami kenaikan produksi apabila dibandingkan dengan tahun 2002 adalah jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang hijau, dan cantel masing-masing sebesar 19,55 persen, 1,89 persen, 6,73 persen, 21,86 persen dan 0,83 persen. Sedangkan kacang tanah dan kacang kedelai mengalami penurunan sebesar 1,22 persen dan 30,24 persen.

Sayur-sayuran yang banyak dihasilkan adalah cabe dan bawang merah, namun pada tahun ini mengalami penurunan sebesar 7,07 persen dan 32,61 persen atau berproduksi sebesar 17.823 ton dan 17.462 ton. Adapun produksi jenis sayuran lainnya relatif kecil. Sawi dan kacang panjang tercatat masing-masing hanya 4.276 ton atau turun 3,27 persen dan 2.967 ton atau naik 44,56 persen.

Salak merupakan komoditas unggulan yang banyak dibudidayakan oleh petani di D.I. Yogyakarta. Pada tahun 2003, produksi komoditas tersebut sebesar 31.046,1 ton atau mengalami penurunan sebesar 57,41 persen dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya yang mencapai 72.901,1 ton (angka diperbaiki). Beberapa buah-buahan lain yang relatif besar hasilnya adalah pisang, mangga dan rambutan masing-masing sebesar 41 090,30 ton, 25 796,60 ton, dan 20.630,80 ton.

II.5.2. Perkebunan

Dari segi produksi, tanaman perkebunan yang cukup potensial di Propinsi D.I. Yogyakarta adalah kelapa dan tebu. Pada tahun ini produksi masing-masing komoditas mencapai 47.532 ton dan 13.992 ton. Angka ini mengalami kenaikan produksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,55 persen dan 2,39 persen.

II.5.3. Kehutanan

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kawasan hutan yang terkonsentrasi di Kabupaten Gunungkidul seluas 77,60 persen dari keseluruhan 17,05 ribu ha. Sebagian besar dari kawasan hutan tersebut merupakan hutan produksi sebesar 81,22 persen, hutan lindung 13,44 persen dan hutan konversi 5,34 persen. Nilai produksi hutan pada tahun 2003 tercatat sebesar Rp 3.037 juta, meningkat sekitar 18,07 persen dibandingkan dengan tahun 2002 yang sebesar Rp 2.573 juta.

II.5.4. Peternakan

Populasi ternak di D.I. Yogyakarta tahun 2003 mengalami penurunan sebesar 3,20 persen dari 586.367 ekor pada tahun 2002 menjadi 567.591 ekor pada tahun 2003. Jenis ternak yang dominan adalah kambing, sapi, dan domba masing-masing sebesar 42,46 persen, 39,51 persen dan 13,95 persen pada tahun 2003.

Adapun jumlah populasi unggas pada tahun 2003 tercatat sebanyak 9,13 juta ekor, turun 0,44 persen dari tahun 2002 yang sebesar 9,17 juta ekor. Sekitar 55,33 persen dari seluruh unggas adalah ayam kampung, disusul ayam ras 42,27

persen (petelur 15,21 persen, pedaging 27,06 persen) dan selebihnya 2,39 persen adalah itik.

Untuk memenuhi konsumsi masyarakat, jumlah ternak yang dipotong mencapai 60.266 ekor pada tahun 2003, mengalami penurunan sekitar 22,65 persen di banding tahun sebelumnya. Ternak yang dipotong terdiri dari sapi 34,40 persen, domba 29,53 persen, kambing 26,90 persen, babi 7,11 persen serta kuda sebesar 1,92 persen.

Adapun jumlah unggas yang dipotong mencapai 25,33 juta ekor, terdiri dari 33,97 persen ayam kampung, 65,39 persen ayam ras (60,38 ayam pedaging dan 5,01 persen ayam petelur) dan selebihnya 0,65 persen adalah itik. Dengan membandingkan antara jumlah populasi unggas dan jumlah unggas yang dipotong terlihat bahwa Propinsi D.I. Yogyakarta memasukkan unggas dari daerah lainnya dengan porsi 63,95 persen dari total yang dipotong. Kenyataan ini menggambarkan lingginya permintaan daging unggas, khususnya daging ayam dan memberi peluang bagi peternak di D.I. Yogyakarta untuk mengembangkan usaha serupa.

Selain daging, produksi peternakan yang banyak dikonsumsi adalah telur. Produksi telur pada tahun 2003 mencapai 236,64 juta butir, naik 6,40 persen dari tahun 2002 yang tercatat sebanyak 222,41 juta butir. Andil peternakan rakyat dalam produksi telur mencapai 55,36 persen (telur ayam ras 22,84 persen, telur ayam kampung 25,14 persen, dan telur itik 7,38 persen) dan selebihnya 44,64 persen dihasilkan oleh perusahaan (seluruhnya berupa telur ayam ras). Produksi peternakan lainnya adalah susu dan kulit. Produksi susu tahun 2003 tercatat 5,60 juta liter, naik 5,61 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar

5,30 juta liter. Andil perusahaan sebesar 67,16 persen dan yang berasal dari peternakan rakyat sebesar 32,84 persen.

Sedangkan produksi kulit turun 24,61 persen dari 74.254 lembar pada tahun 2002 menjadi 55.981 lembar pada tahun 2003. Sebagian besar berupa kulit sapi, domba, dan kambing masing-masing sebesar 37,03 persen, 31,79 persen, dan 28,96 persen. Sisanya berupa kulit kuda dan kerbau sebesar 2,06 persen dan 0,15 persen. Konsumsi telur dan daging pada tahun 2003 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 4,13 persen dan 33,65 persen apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tercatat sebesar 12,525 juta kg dan 24,521 juta kg.

II.5.5. Perikanan

Data perikanan tahun 2003 di Propinsi D.I. Yogyakarta mencatat bahwa produksi perikanan mencapai 8.376,1 ton atau naik sebesar 7,57 persen dibandingkan dengan tahun 2002 yang tercatat sebesar 7.786,8 ton. Sekitar 78,81 persen dari total produksi perikanan merupakan hasil budidaya perikanan darat dan selebihnya 21,19 adalah hasil perikanan laut.

Produksi terbesar perikanan darat berasal dari budidaya di kolam yang mencapai 5.090,6 ton (77,12 persen), disusul hasil dari sungai yang sebesar 1.129,6 ton (17,11 persen). Adapun nilai produksi perikanan tercatat sebesar Rp. 63,57 milyar pada tahun 2003, atau mengalami penurunan sebesar 5,51 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 67,28 milyar. Andil perikanan darat sebesar 76,72 persen dan sisanya 23,28 persen merupakan hasil perikanan laut.

II. 6. Industri, Energy dan Konstruksi

II.6.1. Industri

Sektor industri khususnya industri besar dan sedang berperan cukup besar mendorong pertumbuhan ekonomi- Sifat industri yang cenderung padat modal dan teknologi berpeluang membentuk nilai tambah yang besar dengan pertumbuhan yang tinggi pula.

Pengelompokan industri berdasarkan jumlah tenaga kerja dibagi menjadi empat kelompok yakni industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri rumah tangga Industri besar adalah industri yang menyerap 100 atau lebih pekerja, industri sedang/menengah adalah industri dengan jumlah tenaga kerja antara 20 -99 orang Adapun industri kecil memperkerjakan 5 - 19 orang dan industri rumah tangga adalah industri dengan kurang dari 5 pekerja.

Jumlah unit usaha industri besar dan sedang pada tahun 2002 di Propinsi D.I. Yogyakarta tercatat 397 unit industri, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 394 unit Sebagian besar industri tersebut merupakan industri kayu, bambu, rotan (kode 33) sebanyak 105 unit usaha dan industri tekstil (kode 32) sebanyak 95 unit usaha. Dilihat dari status usahanya, sekitar 45 persen tidak memiliki badan hukum, 29,47 persen berbentuk PT/NV, 14,36 persen berbentuk CV dan selebihnya berbadan hukum lainnya.

Seiring dengan naiknya jumlah unit usaha, tenaga kerja yang terserap naik dari 41.775 orang pada tahun 2001 menjadi 44.328 orang pada tahun 2002 atau naik sekitar 6,11 persen Sebagian besar mereka terserap industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (kode 32) dan industri kayu, bambu, rotan dan sejenisnya

(kode 33) masing-masing sebanyak 17.853 orang pekerja (40,27 persen) dan 9434 orang pekerja (21,28 persen).

Total pendapatan Perusahaan Air Minum pada tahun 2003 mengalami kenaikan sebesar 6,8 persen atau tercatat sebesar Rp. 32.356 juta. Penerimaan dari penjualan air minum sebesar 88,18 persen dan sisanya berasal dari kegiatan lainnya.

II.6.2. Konstruksi

Sejak krisis ekonomi tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 sektor konstruksi masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Namun demikian, pemerintah tetap berusaha untuk merealisasikan pembangunan perumahan melalui Perum Perumnas.

Realisasi kumulatif pembangunan perumahan oleh Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perum Perumnas) di Propinsi D.I. Yogyakarta sampai dengan 30 Juni 2001 tercatat sebanyak 4.911 unit, terdiri dari rumah sangat sederhana sebesar 5,05 persen, rumah inti 37,37 persen, dan rumah sederhana sebesar 57,58. Sedangkan pembangunan rumah susun melalui Perum Perumnas di Propinsi D.I. Yogyakarta belum terlaksana.

Sementara itu, kumulatif pembangunan perumahan dengan fasilitas kredit dari BTN tercalai sebanyak 17.922 unit dengan nilai kredit sebesar Rp. 100.211 juta. Dilihat dari sisi pengeluaran untuk pekerja, terjadi kenaikan yang cukup nyata yaitu sebesar 18,38 persen dari rata-rata pengeluaran per pekerja Rp 5,26 juta pada tahun 2001 menjadi Rp. 6,23 juta pada tahun 2002. Peningkatan ini

mengisyaratkan adanya perbaikan kinerja usaha sehingga mampu meningkatkan pengeluaran untuk kesejahteraan pekerjanya.

Dari seluruh kegiatan industri besar dan sedang pada tahun 2002, nilai output yang dihasilkan mencapai Rp. 2,89 trilyun, meningkat sekitar 15,11 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 2,51 trilyun. Sebesar 70,65 persen seluruh output yang terbentuk merupakan andil industri makanan (kode 31) dan industri tekstil (kode 32) yang masing-masing menyumbang 39,69 persen dan 30,96% persen.

Informasi industri kecil yang berlisensi dengan sumber Dinas Perindustrian mencatat bahwa jumlah industri kecil di DIY tahun 2003 adalah 17.492 unit dengan jumlah tenaga yang terserap sebanyak 68.675 pekerja. Dominasi jenis usaha adalah industri Pengolahan Pangan sebanyak 68,03 persen. Sedangkan berdasarkan wilayah, sekitar 84,40 persen unit usaha berada di wilayah kabupaten Sleman dan menyerap 61,60 persen dari total pekerja industri kecil.

II.6.3. Listrik dan Air Minum

Kebutuhan listrik diperlukan untuk penerangan dan penggerak berbagai peralatan elektronik guna mempermudah kehidupan manusia. Pasokan utama listrik selama ini disuplai oleh PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara (PLN). PLN Distribusi JawaTengah yang menaungi wilayah operasional Yogyakarta memiliki 8 sub unit pelayanan yang tersebar di D.I. Yogyakarta. Unit pelayanan tersebut melayani pelanggan sebanyak 635.410 unit (naik 3,55 persen dari tahun 2002), yang terdiri dari rumah tangga sekitar 93,59 persen, disusul unit usaha

sebanyak 3,58 persen dan selebihnya adalah industri 0,07 persen dan pelanggan umura 2,76 persen.

Jumlah produksi listrik yang dijual selama tahun 2003 mencapai 1.130.83 juta KWH, meningkat sekitar 2,9 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Energi listrik yang terjual tersebut dikonsumsi oleh rumah tangga sekitar 58,13 persen, 17,15 persen oleh unit usaha, industri 14,07 persen dan selebihnya 10,65 persen diserap oleh pelanggan umum.

Kebutuhan air penduduk Propinsi D.I. Yogyakarta selain dipenuhi dengan pemanfaatan air tanah yang dilakukan sendiri oleh penduduk, juga dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum. Propinsi D.I. Yogyakarta memiliki 5 perusahaan air minum yang dikelola pemerintah dan 1 perusahaan air minum yang dikelola swasta, yang mempekerjakan sebanyak 852 orang pada tahun 2003. Jumlah air baku yang diolah oleh PAM mencapai 33,03 juta kubik atau naik sekitar 10,49 persen dari tahun sebelumnya, 1 dan sekitar 55,24 persen bersumber dari air tanah.

Volume air minum yang disalurkan pada pelanggan pada tahun 2003 mencapai 21.28 juta kubik, turun sekitar 1,23 persen dibandingkan tahun 2002. Sekitar 83,86 persen dan seluruh air yang disalurkan dikonsumsi oleh pelanggan rumah tangga, pelanggan niaga dan industri sekitar 5,56 persen, pelanggan instansi pemerintah 5,30 persen dan sosial sebesar 4,88 persen. Sedangkan porsi penyusutan sebesar 35,56 persen dari total air baku.

Nilai air minum yang disalurkan PDAM D.I. Yogyakarta tercatat sebesar Rp. 28.531 juta pada tahun 2003, meningkat 12,2 persen dibandingkan tahun 2002

yang sebesar Rp. 25.428 juta. Sebagian besar pendapatan penjualan air minum berasal dari pelanggan rumah tangga yakni 76,49 persen, disusul pelanggan niaga dan industri sekitar 10,74 persen, pelanggan instansi pemerintah 7,89 persen dan selebihnya adalah pelanggan sosial dan pelanggan lainnya.

II.7. Perdagangan

II.7.1. Perdagangan Dalam Negeri

Ketersediaan bahan pokok strategis seperti beras memperoleh perhatian Pemerintah dalam hal pengadaan dan distribusi guna mengendalikan keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Program ini bertujuan menjaga kestabilan harga beras di pasaran.

Pada tahun 2003, persediaan beras yang dikuasai oleh Badan Urusan Logistik (BULOG) Divre Yogyakarta mencapai 57.717,64 ton atau turun 11,95 persen dari tahun 2002 dan disalurkan sebesar 44.405,60 ton (76,94 persen). Alokasi penyaluran beras terbesar adalah untuk Operasi Pasar Khusus yaitu 91,30 persen, ABRI 7,71 persen, dan selebihnya 0,99 persen untuk konsumen lainnya.

II.7.2. Ekspor dan Impor

Perkembangan transaksi ekspor dan impor menunjukkan dinamika perekonomian suatu wilayah/negara dalam konteks hubungan antar wilayah/negara. Aktivitas ini juga mengisyaratkan kemampuan daya saing produk-produk suatu negara dalam perdagangan global. Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi D.I. Yogyakarta mencatat nilai ekspor daerah ini tahun 2003 mencapai US\$ 115,318 juta, naik sebesar 4,7 persen dari tahun 2002 yang sebesar US\$ 110,140 juta. Sebagian besar volume produk diekspor melalui

Tanjung Mas sebagai pelabuhan laut terdekat dengan Propinsi D.I. Yogyakarta yakni sekitar 91,24 persen.

Peningkatan nilai ekspor empat tahun terakhir ini mengisyaratkan mulai membaiknya perekonomian D.I. Yogyakarta akibat krisis ekonomi pada tahun 1997 (setelah dua tahun sebelumnya yaitu tahun 1998 dan 1999 mengalami penurunan).Dilihat menurut komoditas, persentase nilai ekspor didominasi oleh mebel kayu dan pakaian jadi masing-masing sebesar 26,51 persen dan 21,19 persen, sarung tangan kulit sebesar 10,45 persen, serta kulit disamak sebesar 7,59 persen, tekstil sebesar 6,40 persen dan produk tekstil lainya sebesar 5,76 persen. Andil kelima produk tersebut mencapai 77,90 persen dari total nilai ekspor.

Amerika Serikat menjadi negara tujuan utama ekspor Propinsi D.I.Yogyakarta yang pada tahun 2003 melakukan transaksi sebesar US\$ 49,83 juta atau sekitar 43,21 persen dari total nilai ekspor. Disusul oleh Italia dan Perancis yang masing-masing sekitar 7,24 persen dan 6,77 persen. Untuk kegiatan impor, mulai tahun 2001 ada kebijakan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan bahwa pelaku impor diharuskan untuk melaporkan kegiatan impor mereka. Sedangkan sebelumnya tidak ada kewajiban tersebut. Kebijakan ini berpengaruh pada data impor tahun 2001 yang melonjak cukup tajam dibandingkan data tahun-tahun sebelumnya karena sebagian kegiatan impor sebelum tahun 2001 tidak tercatat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi D.I. Yogyakarta.

Menurut komoditas, pada tahun 2003 total impor yang bernilai sebesar US\$ 40,55 juta didominasi oleh impor mesin sebesar 73,83 persen, bahan baku susu dan kapas masing-masing sebesar 13,37 persen dan 10,20 persen, serta

sisanya 2,60 persen komoditas lainnya. Menurut negara asal, nilai impor yang terbesar berasal dari Jepang yang mencapai USJ 29,67 juta (73,16 persen), kemudian USA sebesar US\$ 2,21 juta (5,45 persen), RRC sebesar USJ 2,02 juta (4,98 persen) dan sisanya dari negara-negara lain sebesar 16,41 persen.

II.8. Perhubungan dan Komunikasi

II.8.1. Jalan Raya dan Angkutan Darat

Jalan raya merupakan sarana utama lalu lintas yang sangat diperlukan untuk transportasi dan kelancaran roda perekonomian, maka kondisi dan penggunaannya harus diperhatikan Tahun 2003. dan 5 056,6 km panjang jalan di D I Yogyakarta (naik 2.79 person dibandinekan tahun 2002), panjang jalan negara sekitar 5,13 persen. panjang jalan propinsi 13,65 persen, dan panjang jalan kabupaten/kota mcncapai 83.22 persen. Dengan jenis permukaan 68.40 persen aspal, 14,92 persen kerikil, sisanya 13,78 persen tanah dan 2,9 persen lainnya yang tidak terinci.

Dilihat menurut kondisi jalan, sekitar 42,50 persen dalam kondisi baik, 36,50 persen dalam konsisi sedang dan sekitar 21,00 person dalam kondisi rusak dan rusak berat. Kondisi jalan yang rusak dan rusak berat sebagian besar terjadi pada jalan-jalan kabupaten/kota. Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di D.I Yogyakarta pada tahun 2003 tercatat sebanyak 782.228 unit (naik 10,87 persen dan tahun 2002) yang terdiri dari 9.55 persen mobil penumpang, mobil beban sebanyak 4,16 persen, 1.03 persen bus dan 85,26 persen sepeda motor atau tercatat 666.941 unit.

Sarana transportasi kereta api menjadi alternatif pilihan utama bagi pemakai jasa angkutan karena sifatnya yang massal dan murah. Namun karena ada kebijakan penurunan harga tiket yang cukup besar dengan fasilitas angkutan udara untuk beberapa tujuan penerbangan maka pemakai sarana kereta api menjadi berkurang. Setelah mengalami penurunan jumlah penumpang sekitar 52,38 persen pada tahun 2002, tahun 2003 terjadi penurunan kembali sebesar 11,23 persen atau tercatat 1.774.407 penumpang untuk berbagai tujuan.

Sedangkan untuk jumlah angkutan untuk bagasi, kiriman dan barang lainnya/paket pos mengalami kenaikan masing-masing sebesar 9,22 persen, 49,95 persen dan 4,20 persen atau tercatat sebesar 38.922 kg, 844.514 kg dan 986.986 kg. Pendapatan PT Kereta Api DAOP IV Propinsi D.I Yogyakarta tahun 2003 mengalami kenaikan 3,31 persen atau tercatat Rp.127,553 milyar yang sebagian besar bersumber dari penjualan tiket penumpang sekitar 68,62 persen, pengiriman barang, sebesar 25,13 persen dan jasa lainnya sebesar 6,25 persen.

II.8.2. Angkutan Udara

Arus transportasi udara mengalami penurunan terus-menerus sejak 1996, namun mulai tahun 2000 mengalami kenaikan. Tahun 2003, jumlah pesawat datang di Bandara Adisucipto tercatat 8.531 kali, naik 32,63 persen dibanding tahun sebelumnya. Adapun pesawat berangkat tercatat sebanyak 8.527 kali atau naik sekitar 32,55 persen dari tahun sebelumnya yang sebanyak 6.433 kali.

Seiring dengan peningkatan jumlah penerbangan, jumlah penumpang datang juga naik dari 479.709 orang pada tahun 2002 menjadi 727.782 orang pada

tahun 2003 atau naik 51,71 persen. Demikian pula penumpang yang berangkat tercatat 710.216 orang atau naik sekitar 51,01 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk penumpang yang transit mengalami kenaikan sebesar 1,51 persen atau tercatat 42.564 penumpang. Volume barang dan bagasi yang dimuat melalui angkutan udara masing-masing mengalami kenaikan sebesar 30,72 persen dan 52,70 persen, sedangkan yang dibongkar naik sebesar 32,33 persen dan 42,52 persen. Untuk paket pos, volume muat dan bongkar masing-masing turun sebesar 10,90 persen. dan 17,24 persen.

Menurut tujuan penerbangan, sebagian besar penumpang menggunakan penerbangan dengan tujuan ke Jakarta sebesar 71,88 persen, Denpasar sebesar 10,73 persen, Surabaya sebesar 10,75 persen, dan sisanya 6,64 persen dengan tujuan kota lainnya. Seimbang dengan penumpang berangkat arus penumpang datang sebagian besar berasal dari kota-kota yang sama yaitu Jakarta sebesar 71,62 persen. Denpasar sebesar 10,45 persen, Surabaya sebesar 11,58 persen dan sisanya 6,35 persen dan kota-kota lainnya.

II.8.3. Perhotelan

Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan bagi D.I Yogyakarta dalam meningkatkan pendapatan daerah. Indikator yang dapat menunjukkan aktivitas kepariwisataan antara lain dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan serta rata-rata lama menginap para wisatawan selama berkunjung di Yogyakarta. Pada tahun 2003 di D.I Yogyakarta tersedia 37 hotel bintang dengan 3.393 kamar dan 5.664 tempat tidur, serta 1.006 hotel melati dengan 10.467 kamar dan 16.337 tempat tidur.

Jumlah wisatawan yang menggunakan fasilitas hotel tercatat sebanyak 895.957 orang, meningkat sekitar 11,97 persen dibanding tahun 2002 yang sebanyak 800.168 orang. Ditinjau menurut kebangsaan, sekitar 7,21 persen tamu yang menginap di hotel adalah wisatawan domestik dan selebihnya 92,79 persen adalah wisatawan asing. Pada tahun 2003, tamu asing yang berkunjung ke Yogyakarta menginap rata-rata selama 3,81 hari, lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya yang selama 3,49 hari. Adapun tamu domestik rata-rata menginap selama 1,79 hari, lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya yang selama 1,75 hari. Tingkat hunian kamar hotel sedikit naik dari 37,61 persen pada tahun 2002 menjadi 39,39 persen pada tahun 2003. Kondisi ini disebabkan oleh kenaikan tingkat hunian kamar hotel berbintang dari 41,36 persen.

II.9. Keuangan dan Harga

II.9.1. Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dengan sistem pelaporan yang standar diperlukan untuk pemantauan posisi keuangan suatu wilayah dengan memperhatikan aspek efisiensi penggunaan keuangan publik. Hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap realisasi hasil pembangunan dengan anggaran yang diserap. Berdasarkan data RAPBD propinsi D.I. Yogyakarta tahun 2003, rencana penerimaan daerah tercatat sebesar Rp.524,49 milyar, naik 8,90 persen dibanding realisasi tahun 2002 yang sebesar Rp.481,64 milyar. Sebagian besar penerimaan berasal Dana Alokasi Umum (Sumbangan) mencapai 40,89 persen, disusul Pendapatan Asli Daerah 39,75 persen. Sisi pengeluaran pada tahun 2003 tercatat sebesar Rp.524,49 milyar atau naik 17,67 persen. Pengeluaran rutin

tetap merupakan bagian terbesar yaitu mencapai 83,46 persen dari total pengeluaran (terutama untuk belanja pegawai sebesar 51,50 persen) sedangkan sisanya pengeluaran pembangunan dan UKP masing-masing sebesar 11,34 persen dan 5,20 persen. Dengan demikian, di pos pengeluaran terjadi kesenjangan yang masih cukup besar antara pengeluaran rutin dengan pengeluaran pembangunan. Jika pada tahun 2001, di luar urusan kas dan perhitungan (UKP), rasio antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sebesar 84 persen berbanding 16 persen. Sedangkan tahun 2002 tercatat 86 persen dan 14 persen dan tahun 2003 sebesar 88 persen dan 12 persen. Komposisi ini tentu tidak sehat bagi kesinambungan pembangunan yang telah dicanangkan.

II.9.2. Bank, Koperasi, Pegadaian, dan Penanaman Modal

Bank Indonesia mencatat jumlah bank yang beroperasi di wilayah D.I. Yogyakarta pada tahun 2003 sebanyak 83 bank, bertambah satu dari tahun sebelumnya. Dari jumlah keseluruhan, sebanyak 74,70 persen diantaranya merupakan bank perkreditan rakyat, disusul 19,28 persen bank swasta nasional, 4,82 persen bank pemerintah dan 1,2 persen bank pembangunan daerah. Jumlah kantor bank tercatat sebanyak 259 unit, tidak termasuk kantor inspeksi dan BRI unit, atau bertambah 4 unit dibandingkan tahun sebelumnya (naik 1,57 persen). Terdiri dari 18,92 persen kantor bank pemerintah, 37,45 persen kantor BPR, 22,39 persen kantor BPD dan sisanya 21,24 kantor bank swasta nasional.

Besarnya dana masyarakat yang berhasil dihimpun pada tahun 2003 tercatat sebesar Rp.9,16 triliun, naik 11,29 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp.8,23 triliun. Sekitar 47,99 persen dari dana yang dihimpun

tersebut berbentuk tabungan, 33,39 persen simpanan berjangka, dan selebihnya sekitar 18,62 persen dalam bentuk giro. Kredit yang disalurkan sebesar 3,73 triliun atau 40,75 persen dari total dana yang dihimpun. Total kredit ini mengalami kenaikan sebesar 34,26 persen dibandingkan dengan tahun 2002. Berdasarkan kelompok bank, penyaluran kredit terbesar berasal dari bank umum pemerintah sebesar 53,32 persen dari total kredit, sedangkan bank swasta nasional, BPR, dan bank asing/campuran masing-masing sebesar 33,64 persen, 12,07 persen, dan 0,97 persen. Menurut jenis penggunaan, untuk modal kerja dan konsumsi masing-masing sekitar 42,01 persen dan 40,17 persen, sedangkan sisanya 17,82 persen untuk investasi.

Di bidang perkoperasian, pada tahun 2003 jumlah lembaga ekonomi yang berbasis kerakyatan ini mencapai 1.919 koperasi atau mengalami kenaikan sebesar 3,90 persen dibandingkan dengan tahun 2002. Jumlah anggota tercatat sebanyak 596.999 orang atau naik 1,55 persen dan ditambah dengan 667 berbentuk unit koperasi atau turun 17,45 persen dari tahun 2002. Dari keseluruhan koperasi, 96,67 persen koperasi non KUD dan sisanya 3,33 persen KUD. Sedangkan berdasarkan tingkatan koperasi, terdiri dari 98,70 koperasi primer dan 1,30 persen koperasi sekunder. Jumlah modal yang dihimpun mencapai 358.974,28 juta atau mengalami kenaikan sebesar 42,35 persen. Volume usaha mencapai 445.704,42 juta (naik 29,37 persen) dengan sisa hasil usaha (SHU) sebesar 18.185,63 juta atau 4,08 persen dari total volume usaha.

Peran lembaga keuangan non bank seperti pegadaian dibutuhkan oleh masyarakat yang sedang dalam kesulitan keuangan untuk memperoleh pinjaman

dengan prosedur yang tidak berbelit serta bunga relatif terjangkau. Jumlah nasabah yang memanfaatkan pegadaian pada tahun 2003 mencapai 617.049 orang (turun 12,57 persen dari tahun 2002) dengan jumlah kredit disalurkan sebesar Rp. 226,46 milyar, naik 5,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp.214,58 milyar. Selama periode yang sama, besarnya pelunasan yang dilakukan nasabah mencapai Rp.223,98 milyar atau 98,9 persen dari total kredit yang disalurkan. Sedangkan sisa hasil usaha yang berupa selisih antara penerimaan dan jumlah kredit yang disalurkan tercatat sebesar 50,9 milyar atau 22,50 persen dari total kredit.

Di bidang investasi kumulatif nilai penanaman modal dalam negeri yang masuk Propinsi D.I Yogyakarta sampai dengan tahun 2003 sebesar Rp.2,41 trilyun dari rencana investasi sebesar Rp 2,03 trilyun atau 118,60 persen dari rencana yang ditetapkan. Sebagian besar investasi dalam negeri yang masuk ditanam di sektor tersier (listrik bangunan dan jasa-jasa) sekitar 49,65 persen, di sektor sekunder (industri) 48,34 persen dan sektor primer (pertanian dan pertambangan) hanya 2,01 persen. Jumlah tenaga kerja yang mampu diserap dengan investasi tersebut sebanyak 27.249 TKI dan 18 orang tenaga kerja asing.

II.10. Konsumsi

Nilai pendapatan suatu rumahtangga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan rumahtangga tersebut dilihat dari sudut pandang ekonomi. Sejauh ini, dalam mengumpulkan data pendapatan, BPS melakukan pendekatan melalui data pengeluaran. Hal ini disebabkan tingginya resiko bias jawaban responden

jika ditanya pendapatannya. Salah satu data pengeluaran rumahtangga yang dikumpulkan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Menurut golongan pengeluaran, pada tahun 2003, sebesar 7,97 persen rumahtangga di D.I. Yogyakarta mempunyai pengeluaran di bawah Rp.100.000 per kapita per bulan. Sedangkan 21,10 persen rumah tangga mempunyai pengeluaran sebesar Rp.100.000 - Rp.149.999 per kapita per bulan. Sedangkan 70,93 persen rumah tangga mempunyai pengeluaran Rp.150.000 ke atas per kapita per bulan.

Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk pada tahun 2003 tercatat sebesar Rp.238.284 per bulan yang terdiri dari pengeluaran makanan sebesar Rp.122.250 (51,30 persen) dan non makanan sebesar Rp.116.034 (48,70 persen). Nilai ini menunjukkan terjadinya kenaikan sekitar 3,46 persen dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.230.315. Berdasarkan daerah, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk perkotaan sebesar Rp.288.651, lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan yang tercatat sebesar Rp.170.090.

Untuk pengeluaran makanan, terjadi penurunan persentase dari total pengeluaran selama beberapa tahun terakhir baik daerah perkotaan maupun pedesaan. Namun pada tahun 2003 persentase konsumsi makanan daerah perkotaan mengalami kenaikan dari 47,04 persen pada tahun 2002 menjadi 49,21 persen, sedangkan daerah pedesaan mengalami penurunan dari 60,69 persen pada tahun 2002 menjadi 56,12 persen di tahun 2003. Berbeda dengan pola konsumsi makanan, pada tahun 2003 persentase pengeluaran untuk konsumsi non makanan

di daerah perkotaan mengalami penurunan menjadi 50,79 persen dan di daerah pedesaan naik menjadi 43,88 persen dan total pengeluaran.

Secara umum ketersediaan pangan nasional ditinjau dari kecukupan gizi yang diisyaratkan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi ke VI (2000). Angka kecukupan kalori yang harus dicapai adalah 2.200 kkal per kapita per hari pada tingkat konsumsi dan 2.550 kkal per kapita per hari pada tingkat ketersediaan. Sedangkan angka kecukupan protein adalah 50 gram per kapita per hari pada tingkat konsumsi dan 55 gram per kapita per hari pada tingkat ketersediaan.

Jumlah kalori yang dikonsumsi penduduk D.I. Yogyakarta pada tahun 2002 tercatat sebesar 1.904.13 K.kalori per kapita per hari atau naik sebesar 8,49 persen dibandingkan dengan konsumsi kalori tahun 1999. Jika dibandingkan dengan standar kecukupan kalori angka tersebut masih lebih rendah 13,45 persen atau sekitar 86,55 persen dari yang diisyaratkan.

Untuk konsumsi protein, pada tahun 2002 tercatat sebesar 50,74 gram per kapita per hari atau naik sebesar 12,03 persen dibandingkan dengan konsumsi protein tahun 1999. Nilai konsumsi ini sedikit lebih tinggi atau mencapai 101,48 persen dan jumlah yang diisyaratkan. Pada tahun 2002 berdasarkan area, penduduk perkotaan mempunyai tingkat konsumsi kalori yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan penduduk pedesaan, Sedangkan untuk konsumsi protein, penduduk perkotaan mempunyai tingkat konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk pedesaan.

II.11. Pendapatan Regional

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang terbentuk dan keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu. PDRB disajikan menurut harga konstan dan harga berlaku. Dari PDRB alas dasar harga konstan dapat dihitung pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pertambahan riil size ekonomi suatu wilayah. Adapun dengan PDRB alas dasar harga berlaku dapat dilihat struktur ekonomi yang menggambarkan andil masing-masing sektor ekonomi.

II.11.1. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan perhitungan PDRB atas harga konstan, perekonomian Propinsi D.I. Yogyakarta tahun 2003 tumbuh sekitar 4,09 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,02 persen (angka diperbaiki). Hal yang menggembirakan dari gambaran ekonomi D.I. Yogyakarta tahun 2003 adalah pertumbuhan positif dari seluruh sektor Sektor Bangunan tetap mengalami pertumbuhan paling besar yaitu sebesar 10,32 persen. Disusul dengan sektor Perdagangan dan sektor Listrik, Gas, Air Minum masing-masing sebesar 5,73 persen dan 5,72 persen. Sedangkan sektor pertanian yang sebelumnya tumbuh negatif, pada tahun ini mampu tumbuh positif sebesar 4,85 persen.

Pertumbuhan sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan tercatat sebesar 4,98 persen. Sebagai daerah yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari kegiatan jasa, kondisi ini memperlihatkan masih dinamisnya aktivitas ekonomi. Selain sektor-sektor diatas, sektor-sektor Industri Pengolahan dan sektor Angkutan dan Komunikasi juga berperan positif meskipun mengalami penurunan

dibandingkan tahun sebelumnya, masing-masing tumbuh sebesar 2,38 persen dan 2,33 persen. Meski andil sektor Industri masih lebih kecil dari sektor Pertanian ataupun sektor Jasa-jasa, namun sektor Industri tetap merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi yang potensial karena sifat industri yang mampu mendorong pembentukan nilai tambah yang tinggi.

II.11.2. Struktur Ekonomi

Nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku Propinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2003 tercatat sebesar Rp 18.838.844 juta dengan PDRB per kapita sebesar Rp. 5.906.623 atau naik 11.92 persen. Berdasarkan komposisi nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dapat diketahui bahwa peran sektor Pertanian sebagai penyumbang terbesar dalam perekonomian Propinsi D.I. Yogyakarta mulai tergeser oleh sektor lain.

Pada tahun 2003, andil terbesar berasal dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 19,31 persen, kemudian sektor Jasa-jasa sebesar 17,47 persen. Kemudian sektor Pertanian dan Industri Pengolahan memiliki andil 16,54 persen serta 14,46 persen Sektor Keuangan. Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 10,97 persen serta sektor Angkutan dan Komunikasi tercatat sebesar 10,48 persen. Sedangkan sektor Bangunan serta sektor Pertambangan dan Penggalan masing-masing sebesar 8,44 pasen, dan 1,41 persen. Sektor Listrik, Gas, Air Bersih merupakan sektor dengan andil terkecil atau tercatat sebesar 0,92 persen dari total PDRB harga berlaku.

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

Beberapa penelitian sebelumnya tentang pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan di Indonesia :

Hasil penelitian Ulyy Adriyani tentang tingkat pemerataan distribusi pendapatan Kab. Temanggung, mengambil data dengan cara :

1. Interview atau wawancara dengan narasumber
2. Membaca literatur-literatur atau laporan-laporan hasil dari suatu survey yang diperoleh dari instansi-instansi resmi pemerintah.

Dengan menggunakan alat analisis Koefisien Gini dan Kurva Lorentz, menghasilkan kesimpulan :

- a) Hasil yang diperoleh dari perhitungan yang menggunakan rumus Indeks Gini maka dapat diketahui bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Temanggung nilainya selalu kurang dari 0,35 yang menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan yang terjadi terlihat rendah.
- b) Pertumbuhan ekonomi di daerah Temanggung sangat dipengaruhi oleh factor pendapatan penduduk dan Pemda Dati II Temanggung sebagai distributor penggerak perekonomian daerah Temanggung.

- c) Pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pemerataan distribusi pendapatan Daerah Temanggung sangat besar, terutama terhadap masyarakat Kabupaten Temanggung.
- d) Pemda Dati II Temanggung sebagai pengambil keputusan sangat berperan dalam menentukan distribusi pendapatan masyarakat Temanggung.

Pendapatan di Kabupaten Temanggung relatif kecil , dengan alasan :

- Mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar hampir sama yaitu sebagai petani, terutama petani tembakau.
- Golongan masyarakat berpendapatan tinggi jumlahnya relatif sedikit dan mempunyai usaha yang bergantung pada sebagian besar masyarakat kabupaten Temanggung yaitu sebagai pengusaha yang bergerak dibidang usaha tembakau, sehingga dapat dikatakan golongan masyarakat berpendapatan tinggi juga berperan sebagai agen distribusi pendapatan.
- Kepemilikan atas faktor produksi sebagian besar dimiliki oleh mayoritas masyarakat, sehingga kepemilikan faktor produksi oleh minoritas masyarakat relatif kecil.

Hasil penelitian Samsubar Salch tentang faktor-faktor penentu tingkat kemiskinan di Indonesia, mengambil data sekunder yang berasal dari *Indonesian Human Development Report* (2001) dengan alat analisa regresi, dengan variable

yang berfungsi sebagai variable dependent adalah variable tingkat kemiskinan dan variable independent meliputi

- a) Tingkat pendapatan perkapita per propinsi (dalam puluhan ribu rupiah).
- b) Pengeluaran pemerintah untuk investasi sumber daya manusia perkapita per propinsi (dalam ribu rupiah).
- c) Pengeluaran pemerintah untuk investasi fisik perkapita per propinsi (dalam ribuan rupiah).
- d) Angka harapan hidup (dalam tahun).
- e) Angka melek huruf persentase dari total penduduk.
- f) Rata-rata lama bersekolah penduduk (dalam tahun).
- g) Indeks pengembangan manusia.
- h) Indeks partisipasi wanita dalam ekonomi dan politik.
- i) Rasio gini (dalam persen).
- j) Rasio populasi rumah tangga yang tidak mendapat akses fasilitas kesehatan (dalam persen).
- k) Rasio populasi rumah tangga yang tidak mendapat akses terhadap air bersih.
- l) Variabel boneka

Menghasilkan kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan per provinsi di Indonesia adalah indeks pembangunan manusia yang terdiri dari pendapatan perkapita, angka harapan hidup, rata-rata bersekolah, investasi fisik, pemerintah daerah, tingkat kesenjangan pendapatan, tingkat partisipasi ekonomi

dan politik perempuan, populasi penduduk tanpa akses terhadap fasilitas kesehatan, populasi penduduk tanpa akses terhadap air bersih, dan krisis ekonomi.

Hasil penelitian Syamsul Amar yang berjudul Kajian Ekonomi Tentang Kemiskinan di Pedesaan Provinsi Sumatra Barat, mengambil data Primer dengan alat analisis *Multiple Logistic Regression, Chi Square, Wald Test, Odds Ratio dan Pooled Variance t-Mode*, dengan menggunakan variabel sebagai berikut: luas lahan 2, luas lahan 3, teknologi, pendidikan 1, pendidikan 2, pendidikan 3, kesehatan, akses 1, akses 2, akses 3, mata pencaharian alternatif, dan konstanta. Menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- a) Luas lahan 1, pendidikan 1,2 dan 3 serta akses 1 tidak menunjukkan signifikan terhadap variabel terikat.
- b) Luas lahan 3, teknologi, kesehatan, akses 2,3, mata pencaharian alternatif dan konstanta menunjukkan signifikan terhadap variabel terikat.

BAB IV

LANDASAN TEORI

IV.1. Landasan Teori

IV.1.1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan dilaksanakan oleh banyak negara, baik yang relatif sudah maju (negara maju) maupun negara yang relatif belum maju (negara sedang berkembang), sebagai usaha untuk dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pembangunan yang berhasil tidak hanya ditunjukkan dengan kenaikan pendapatan nasional riil dan kenaikan produktivitas, namun juga harus dapat mewujudkan pemerataan bagi seluruh masyarakat.

Lebih lanjut perlu kiranya mengetahui beberapa pengertian pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi serta teori yang bersangkutan dengan pembangunan ekonomi.

IV.1.2. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pada mulanya upaya pembangunan negara sedang berkembang diidentifikasi dengan upaya meningkatkan pendapatan perkapita, atau populer disebut strategi pertumbuhan ekonomi. Semula banyak yang beranggapan yang membedakan antara negara maju dengan negara sedang berkembang adalah pendapatan rakyatnya. Dengan di tingkatannya pendapatan perkapita diharapkan masalah seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan

yang dihadapi di negara sedang berkembang dapat di pecahkan misalnya melalui apa yang dikenal dengan “dampak merembes kebawah (*trickle down effect*). (Kuncoro, 2003; 7).

Pada dasawarsa 1960-an, banyak negara sedang berkembang mulai menyadari bahwa “pertumbuhan (*growth*) tidak identik dengan pembangunan (*development*). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi setidaknya melampaui negara-negara maju pada tahap awal pembangunan mereka, memang dapat dicapai namun dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang timpang, dan ketidakseimbangan struktur perekonomian (Kuncoro. 2003;9).

Dilihat dari aspek ekonomi, prestasi pembangunan dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional per kapita. Meski bukan indikator pembangunan yang memadai indikator ini sering digunakan sebagai indek pembangunan karena: (Irawan, 2000: 292-293).

1. Pendapatan per kapita merupakan indek tunggal yang kita punyai.
2. Memang tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan.
3. Pendapatan per kapita merupakan petunjuk yang cukup baik bagi struktur ekonomi dan sosial masyarakat .

Pembangunan yang berorientasikan pada kenaikan PDB atau pendapatan per kapita saja belum tentu memecahkan permasalahan pembangunan seperti kemiskinan dan pemerataan. Hal ini tampak pada taraf hidup sebagian besar masyarakat yang

tidak mengalami perbaikan kendatipun realisasi kenaikan pendapatan nasional setiap tahunnya telah tercapai bahkan melebihi target.

Untuk mengetahui laju pembangunan suatu negara pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya dapat diukur dengan pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan suatu perekonomian (negara) dalam waktu satu tahun, ada tiga metode perhitungannya yaitu metode produksi (nilai tambah), metode pendapatan dan metode pengeluaran (Arsyad, 1999; 13).

Metode produksi dihitung dengan cara menjumlahkan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh setiap sektor produktif dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Teknis perhitungan pendekatan produksi dihitung ada dua cara yaitu dengan menghitung nilai akhir produksi, dan menjumlahkan nilai tambah (*value added*) yang diciptakan. Cara kedua dilakukan untuk menghindari terjadinya perhitungan berganda (*double* atau *multiple counting*). Oleh karena itu pendekatan produksi disebut juga dengan pendekatan nilai tambah (*value added*) (Arsyad, 1999: 13-14).

Metode pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran dari lapisan masyarakat. Dengan metode ini pengeluaran dibagi-bagi ke dalam (Arsyad, 1999; 14-15):

1. Pengeluaran produksi dan rumah tangga (*personal consumption expenditure*) yang terdiri dari: pengeluaran barang-barang yang tahan lama (*durable goods*) dan yang tidak (C).
2. Investasi domestik bruto atau investasi yang terdiri dari: bangunan-bangunan baru, alat-alat produksi yang tahan lama, dan persediaan barang-barang oleh perusahaan (I).
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah (*government expenditure*) (G).
4. Ekspor (X) dikurangi import (M).

Secara matematis pendapatan nasional dengan metode pengeluaran dirumuskan sebagai $Y = C + I + G + (X - M)$.

Metode pendapatan nasional dapat dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan faktor-faktor produksi (tanah, modal, tenaga, dan wiraswasta (*entrepreneur*), yang digunakan untuk balas jasa yaitu sewa, bunga, laba dan gaji. Pendapatan nasional menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai pada suatu tahun tertentu, perubahan nilai pendapatan nasional yang terjadi dari tahun ke tahun disebabkan oleh dua faktor yaitu perubahan tingkat kegiatan ekonomi dan perubahan harga-harga.

Berdasarkan macamnya pendapatan nasional ada dua yaitu pendapatan nasional berdasarkan harga konstan (riil) dan pendapatan nasional berdasarkan harga berlaku (nominal). Pendapatan berdasarkan harga berlaku dihitung berdasarkan harga

saat itu (pendapatan berdasarkan harga berlaku mencakup nilai inflasi), sedangkan pendapatan berdasarkan harga konstan dihitung berdasarkan banyaknya barang yang dapat diperoleh dari banyaknya uang berdasarkan tahun tertentu (tahun dasar). Pendapatan nasional berdasarkan harga konstan dapat ditentukan dengan cara mendeflasikan pendapatan nasional berdasarkan harga berlaku yaitu dengan menilainya kembali berdasarkan atas harga-harga pada tahun dasar tertentu (*base year*).

$$Y_{HK} = \frac{100}{IHK} \times Y_{HB}$$

Dimana Y_{HK} adalah pendapatan nasional berdasarkan harga konstan, Y_{HB} adalah pendapatan harga berlaku, IHK (indeks harga konsumen) adalah indeks yang menunjukkan perubahan harga dari barang-barang yang dikonsumsi masyarakat dari waktu ke waktu. IHK juga mencerminkan nilai dari inflasi (Arsyad, 1999; 15-16).

PDB (Produk Domestik Bruto) atau GDP (*Gross Domestic Product*) dan PNB (Produk Nasional Bruto) atau GNP (*Gross National Product*) berbeda. PDB adalah jumlah nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk dalam suatu wilayah negara (penduduk yang berada di dalam negeri dan warga negara asing yang tinggal di negara tersebut) selama periode tertentu, sedangkan PNB adalah jumlah nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (penduduk yang berada di dalam negeri termasuk penduduk negara yang bersangkutan yang tinggal di luar negeri).

Makna pembangunan ekonomi selama tiga dekade yang lalu adalah kemampuan ekonomi nasional dimana keadaan ekonomi mula-mula relatif statis selama jangka waktu yang lama untuk menaikkan dan mempertahankan kenaikan GNP antara 5%-7% atau lebih per tahun, namun pada tahun 1950-an dan 1960-an makna pembangunan ekonomi mengalami perubahan yang menunjukkan bahwa pembangunan berorientasikan pada kenaikan GDP saja tidak bisa memecahkan permasalahan pembangunan secara mendasar hal ini dapat dilihat pada taraf dan kualitas hidup sebagian besar masyarakat tidak mengalami kenaikan meskipun target kenaikan GNP pertahun telah tercapai.

Todaro mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai pokok (Arsyad, 1999; 11):

1. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok (*basic needs*).
2. Meningkatkan rasa harga diri (*self-esteem*).
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*).

Meier (1995) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses di mana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah “garis kemiskinan absolut” tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Kuncoro, 2003: 17).

Selama dasawarsa 1970-an muncul pandangan mengenai pembangunan ekonomi bahwa tujuan utama pembangunan ekonomi bukan lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang, hal tersebut didukung oleh Dudley Seers (1972) mengatakan bahwa suatu negara dikatakan mengalami proses pembangunan jika kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan berkurang dan mengalami perubahan yang berarti (Baroni, 2002: 4).

Seringkali pembangunan ekonomi (*economic development*) diartikan sama dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), namun beberapa ahli membedakan kedua istilah tersebut mengartikan pembangunan ekonomi sebagai (Arsyad, 1999: 12-13):

1. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan GDP atau GNP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan penduduk, atau
2. Perkembangan GDP atau GNP yang terjadi dalam suatu negara dibarengi oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya (transformasi struktural).

Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Suatu perekonomian dinyatakan berkembang jika pendapatan per kapita menunjukkan kecenderungan jangka panjang namun tidak berarti bahwa pendapatan per kapita akan mengalami kenaikan terus menerus. Adanya resesi ekonomi, kekacauan politik, dan penurunan ekspor mengakibatkan suatu perekonomian mengalami penurunan tingkat kegiatan ekonomi namun jika kegiatan ekonomi secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun, maka masyarakat mengalami pembangunan ekonomi (Arsyad, 1999; 13).

Kuznets (pertumbuhan ekonomi modern) mengartikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai peningkatan kemampuan negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, yang mana pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi, kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya. Komponen dari definisi tersebut adalah (Arsyad, 1999: 221):

1. Kenaikan output nasional secara terus-menerus merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk menyediakan berbagai macam barang ekonomi merupakan tanda kematangan ekonomi.
2. Kemajuan teknologi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, namun belum merupakan syarat yang cukup. Untuk merealisasikan potensi pertumbuhan yang terkandung dalam teknologi baru, maka
3. Penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi harus dilakukan. Inovasi teknologi tanpa disertai inovasi sosial ibarat bola lampu tanpa aliran listrik. Potensi ada tetapi tanpa input yang melengkapi tidak akan berarti apa-apa.

Negara-negara yang sekarang disebut sebagai negara maju mengawali pembangunannya juga sebagai negara sedang berkembang. Namun apa yang dulu mengantarkan negara maju ke kondisinya sekarang ternyata tidak bisa diterapkan begitu saja di negara sedang berkembang. Ada perbedaan-perbedaan mendasar atas kondisi-kondisi awal di bidang ekonomi, sosial dan politik. Dalam kondisi awal terdapat delapan perbedaan penting yang mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi dan syarat-syarat terlaksananya pembangunan ekonomi modern (Todaro, 2000: 150):

1. Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas modal manusia
2. Pendapatan per kapita dan tingkat GNP di saat mulai membangun
3. Perbedaan iklim
4. Perbedaan jumlah penduduk, distribusi dan laju pertumbuhannya
5. Peranan sejarah migrasi internasional
6. Perbedaan dalam memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional
7. Kemampuan melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmiah dan teknologi dasar
8. Stabilitas dan fleksibilitas lembaga-lembaga politik.

IV.1.3. Manfaat Pembangunan Ekonomi

Diharapkan dengan adanya pembangunan ekonomi memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini tercermin dari (Prayitno, 1985: 28-29):

1. Output (kekayaan) dari masyarakat akan bertambah.

2. Kesempatan untuk mengadakan “pilihan” makin menjadi luas.
3. Kemampuan yang lebih besar kepada manusia untuk menguasai alam, dan akan mempertinggi kebebasan manusia untuk mengadakan suatu tindakan tertentu.
4. Diperoleh suatu tambahan kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih luas. Dalam perekonomian yang masih primitif orang dipaksa untuk bekerja keras hanya untuk mempertahankan hidupnya untuk sekedar tidak mati.
5. Berkurangnya *gap* antara yang kaya dengan yang miskin, antara negara maju dengan negara sedang berkembang.
6. Kemungkinan seseorang untuk memikirkan lebih banyak sifat-sifat kemanusiaan oleh karena makin banyaknya sarana yang tersedia.

IV.2. Distribusi Pendapatan

Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan, masalah distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan tidak dapat dipisahkan. (Arsyad. 1999; 224-225).

Secara umum Todaro mengatakan ada dua argumen yaitu (Todaro, 2000: 212-215):

1. Argumen tradisional menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih utama dari pada distribusi pendapatan karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dianggap sebagai syarat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kemudian melalui mekanisme “efek perembesan ke bawah” (*trickle down effect*) diharapkan distribusi pendapatan lebih baik.

2. Argumen tandingan mengemukakan bahwa argumen tradisional tidak benar dan distribusi pendapatan tidak bisa di nomorduakan karena distribusi pendapatan justru merupakan syarat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dikarenakan (Todaro, 2000: 213-215):

- a. Ketimpangan yang begitu besar dan kemiskinan yang begitu luas telah menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga masyarakat miskin tidak memiliki akses terhadap perolehan kredit.
- b. Berdasarkan data observasi orang-orang kaya di negara sedang berkembang tidak bisa diharapkan meningkatkan tabungan dan menanamkan modalnya di dalam negeri tetapi justru melarikan modalnya ke luar negeri (*capital flight*).
- c. Rendahnya pendapatan dan taraf hidup mengakibatkan kondisi kesehatan dan pendidikan rendah yang akhirnya produktifitas juga rendah.
- d. Upaya-upaya meningkatkan pendapatan penduduk miskin akan memotivasi peningkatan permintaan produk dari dalam negeri.
- e. Tercapainya distribusi pendapatan yang adil dapat tercipta insentif.

Secara umum yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang menurut Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris (Arsyad, 1999; 226-227):

1. Pertambahan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita.
2. Inflasi dimana pendapatan bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.

3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidak elastisan permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor di negara sedang berkembang.
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Pada umum terdapat dua ukuran pokok distribusi pendapatan yang biasa digunakan yaitu (Todaro, 2000; 166-173):

1. Distribusi Ukuran (*size distributions*)
2. Distribusi Fungsional atau Distribusi Kepemilikan Faktor-faktor Produksi.

Distribusi ukuran adalah besar atau kecilnya pendapatan yang diterima masing-masing individu, ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu. Sedangkan distribusi fungsional atau distribusi

kepemilikan fakto-faktor produksi adalah persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, berfokus pada pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja, dan modal).

Masalah distribusi pendapatan atau ketimpangan dalam pembagian pendapatan dapat juga ditinjau dari tiga sisi (Dumairy, 1999: 56):

1. pembagian pendapatan antar lapisan pendapatan masyarakat
2. pembagian pendapatan antar daerah (desa-kota)
3. pembagian pendapatan antar wilayah

Segi lain dari ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antar berbagai daerah, yang menyebabkan pula ketimpangan dalam tingkat pendapatan per kapita antar daerah. Maka masalah ketimpangan dalam pembagian pendapatan dapat ditinjau dari tiga segi (Wie, 1983: 9):

1. Pembagian pendapatan antar golongan pendapatan (*size distribution of income*) yang disebut pula sebagai ketimpangan relatif
2. Pembagian pendapatan antar daerah perkotaan dan pedesaan (*urban-rural income disparities*)
3. Pembagian pendapatan antar daerah (*regional income disparities*).

Ukuran distribusi pendapatan antara lain Koefisien Gini dan Kurva Lorenz. Koefisien Gini dirumuskan sebagai berikut (Arsyad, 1999: 232-233):

$$KG = 1 - \sum_1^n (X_{i+1} - X_i)(Y_i + Y_{i+1})$$

atau

$$KG = 1 - \sum_1^n f_i(Y_{i+1} + Y_i)$$

Keterangan:

KG = Angka Koefisien Gini

X_i = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i

f_i = Proporsi jumlah rumah tangga (penduduk) dalam kelas i

Y_i = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i

Koefisien gini merupakan ketidakmerataan agregat dan bernilai antara 0-1, dimana semakin mendekati 0 menunjukkan pemerataan sempurna, mendekati 1 menunjukkan ketidakmerataan sempurna. Jika nilai koefisien Gini sebagai berikut (Arsyad, 1999: 233):

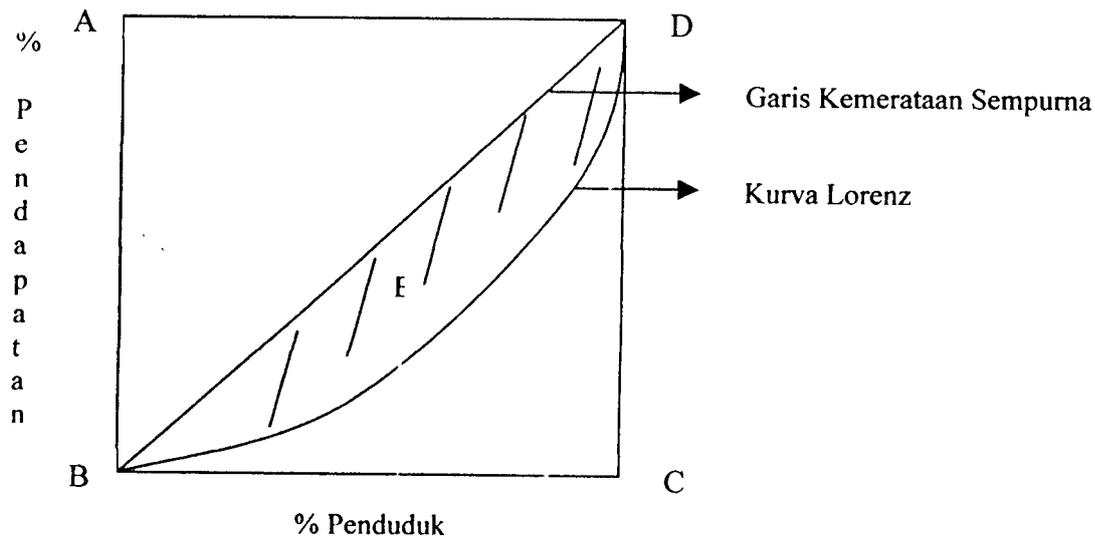
0,20-0,35 = ketidakmerataan pendapatan rendah

0,36-0,49 = ketidakmerataan pendapatan sedang

0,50-0,70 = ketidakmerataan pendapatan tinggi

Kurva Lorenz dikenalkan oleh Conrad Lorenz pada tahun 1905. Kurva ini menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk (sumbu horizontal) dan persentase pendapatan (sumbu vertikal) dengan sebuah garis diagonal (yang

menunjukkan pemerataan sempurna). Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal maka semakin timpang (distribusi pendapatan tidak merata).



Gambar I

Kurva Lorenz

Dari Kurva Lorenz yang diketahui, Koefisien Gini juga dapat dicari dengan rumus sebagai berikut (Arsyad, 1999: 232):

$$\text{Koefisien Gini} = \frac{\text{Luas daerah arsir E}}{\text{Luas } \Delta \text{ BCD}}$$

Bank Dunia telah membuat kriteria untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan dengan cara melihat besarnya kontribusi atau sumbangan dari 40% penduduk termiskin suatu wilayah. Kriteria tersebut sebagai berikut:

1. Apabila kelompok 40% penduduk termiskin memperoleh pendapatan lebih kecil 12% dari keseluruhan pendapatan maka dikatakan wilayah tersebut berada dalam tingkat ketimpangan yang tinggi dalam distribusi pendapatannya.

2. Apabila kelompok 40% penduduk termiskin memperoleh pendapatan antara 12 sampai 17% dari keseluruhan pendapatan maka dikatakan wilayah tersebut berada dalam tingkat ketimpangan yang sedang atau moderat dalam distribusi pendapatannya.
3. Apabila kelompok 40% penduduk termiskin memperoleh pendapatan lebih besar 17% dari keseluruhan pendapatan maka dikatakan wilayah tersebut berada dalam tingkat ketimpangan rendah dalam distribusi pendapatannya.

IV.2.1. Teori Kesenjangan

IV.2.1.1. Myrdal

Profesor Myrdal (1957) berpendapat bahwa jurang pembangunan di antara negara-negara miskin dan negara-negara kaya menjadi bertambah lebar akibat berlakunya sebab-akibat kumulatif (*circular cumulative causation*).

Perpindahan modal cenderung menambah ketidakmerataan di daerah-daerah yang sedang berkembang, permintaan barang atau jasa akan mendorong naiknya investasi, yang pada waktunya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerah-daerah yang kurang berkembang, permintaan akan investasi rendah karena pendapatan masyarakat yang rendah. Semua perubahan untuk daerah-daerah yang dirugikan yang timbul karena adanya ekspansi ekonomi dari suatu daerah disebut *Backwash effects*. Sedangkan keuntungan bagi daerah-daerah di sekitar di mana ekspansi ekonomi terjadi, misalnya terjual hasil produksi daerah, adanya kesempatan kerja baru, dan sebagainya. Pengaruh yang menguntungkan tersebut dinamakan *Spread effects*.

Faktor yang menimbulkan *backwash effects* meliputi: (1) corak perpindahan penduduk dari daerah miskin ke daerah maju yang pada umumnya merupakan tenaga kerja muda, mempunyai semangat kerja yang lebih tinggi dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada yang tinggal di daerah miskin; (2) corak pengaliran modal di mana permintaan modal di daerah miskin kurang dan lagi pada umumnya modal lebih menghasilkan di daerah maju daripada di daerah miskin; (3) pola perdagangan dan kegiatan perdagangan terutama didominasi oleh industri-industri di daerah yang lebih maju.

Untuk mencapai kesejahteraan maka *spread effects* harus lebih besar dibandingkan dengan *backwash effects* tetapi pada kenyataannya di daerah-daerah miskin, *spread effects* jauh lebih kecil dibandingkan *backwash effects* yang dialami sehingga secara keseluruhan ekspansi ekonomi daerah kaya akan memperlambat pembangunan daerah miskin. Akibatnya jurang kesejahteraan akan semakin melebar (Arsyad, 1999; 303-304).

IV.2.1.2 Hirschman

Hirschman mengemukakan bahwa jika suatu daerah mengalami perkembangan, maka perkembangan itu dapat membawa pengaruh atau imbas ke daerah lain. Daerah di suatu negara dapat di bedakan yaitu daerah kaya dan daerah miskin. Jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin jauh berarti terjadi proses pengkutuban atau pembangunan yang timpang (*polarization effects*).

IV.2.1.3. Jeffrey Williamson

Menurut Williamson, kesenjangan antar daerah akan memberikan pengaruh tidak baik bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar daerah, mengingat konsekuensi yang ditimbulkannya (Muta'ali, 1997: 2):

1. Makin besar arus migrasi penduduk desa, terutama yang memiliki keterampilan ke wilayah perkotaan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.
2. Investasi cenderung mengalir ke wilayah atau daerah yang sudah berkembang dengan tingkat sarana dan prasarana yang memberikan keuntungan serta aglomerasi tinggi.
3. Pemerintah cenderung melakukan investasi pembangunan di daerah-daerah yang sudah berkembang hal ini semakin memperburuk perbedaan kemajuan atau kesenjangan antar daerah.
4. Tidak adanya keterkaitan antara pusat dan regional, baik ke kota maupun ke pedesaan melalui kota-kota tertentu yang menghambat proses penyebaran kemajuan (*spread effect*) ke daerah-daerah lain. Akibatnya intensitas dan konsentrasi kegiatan serta hasil pembangunan terpusat pada daerah-daerah maupun kota-kota yang telah berkembang.

IV.2.1.4. Andre Gunder Frank dan Dos Santos

Dalam konteks hubungan ekonomi antara negara maju (negara metropolis maju= *developed metropolitan countries*) dan negara sedang berkembang (negara satelit yang terbelakang= *satellite underdeveloped countries*), negara satelitlah yang dirugikan akibat pertukaran yang tidak adil (terjadi pengalihan surplus dari negara satelit ke negara metropolis yang tidak imbang). Hubungan antara negara

metropolis dan satelit menyentuh seluruh sektor di negara-negara miskin, dan keterbelakangan sektor tradisional ini justru diakibatkan oleh adanya kontak dengan sistem kapitalis dunia yang masuk ke negara miskin melalui sektor modern. Sektor modern di negara miskin adalah kaki tangan sistem kapitalis dunia yang melakukan eksploitasi terhadap daerah atau sektor yang sekarang menjadi terbelakang. Sedangkan di dalam negeri negara miskin, kaum borjuis nasional yang disebut golongan komprador dan penguasa nasional semakin memantapkan keberadaan sektor modern dalam menguasai sistem perekonomian yang ada. Perkembangan sektor modern di negara miskin sesuai dengan perkembangan sektor modern dunia. Yang berarti sektor modern negara miskin mempunyai ketergantungan tinggi untuk berkembang terhadap sektor yang sama di negara maju. Dengan demikian sektor modern negara miskin tidak lebih dari sekedar satelit yang tidak dapat sendiri dan sangat tergantung pada kondisi perekonomian negara maju (Arief, 1984: 23-27).

II.3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu timbul dalam proses pembangunan suatu negara. Meski banyak program ditujukan untuk penghapusan kemiskinan, namun masalah ini tak kunjung selesai. Sulitnya penyelesaian masalah kemiskinan disebabkan permasalahan yang melibatkan penduduk miskin sangat kompleks.

Menurut Bank Dunia, Indonesia telah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin secara relatif dari 40,08% pada tahun 1976 menjadi 17,42% dari jumlah populasi pada tahun 1987 penurunan yang cukup besar kurun waktu 10 tahun. Namun

demikian secara absolut jumlah penduduk yang masih hidup dibawah garis kemiskinan masih banyak yaitu 22,6 juta jiwa, kelompok “nyaris miskin” ini sangat rawan terhadap perubahan-perubahan keadaan ekonomi seperti kenaikan harga komoditi-komodoti utama atau turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu masalah kemiskinan harus diperhatikan secara serius (Arsyad, 1999; 236).

Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Kuncoro, 2003: 123). Berdasarkan definisi tersebut yang menjadi permasalahan dalam kemiskinan adalah standar hidup. Seseorang atau sekelompok masyarakat miskin akan mempunyai daya aksesibilitas (di sini berarti kemampuan untuk dapat mencapai atau mendapatkan sesuatu yang sebenarnya merupakan kebutuhan dasarnya dan seharusnya menjadi haknya sebagai manusia dan warga negara) yang rendah dan terbatas dibandingkan dengan golongan menengah atau golongan kaya. Akses-akses yang tidak bisa didapat oleh masyarakat miskin meliputi (Wibowo, 2003: 27-28):

1. Akses untuk mendapatkan makanan yang layak
2. Akses untuk mendapatkan sandang yang layak
3. Akses untuk mendapatkan rumah yang layak
4. Akses untuk mendapatkan layanan kesehatan
5. Akses untuk mendapatkan layanan pendidikan
6. Akses kepada *leisure* dan *entertainment*
7. Akses untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik.

Andre Bayo Ala, 1981 mengatakan bahwa kemiskinan bersifat multi dimensional. Artinya karena kebutuhan seseorang atau kelompok bermacam-macam, maka kemiskinan memiliki beberapa aspek yaitu dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan asset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta ketrampilan dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan social, sumber-sumber keuangan atau informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Arsyad, 1999; 237).

Empat dimensi pokok kemiskinan (Jendela, 2002: 10):

1. kurangnya kesempatan
2. rendahnya kemampuan
3. kurangnya jaminan
4. ketidakberdayaan

Kemiskinan tidak mutlak hanya milik NSB, kemiskinan merupakan masalah universal yang dihadapi oleh semua negara termasuk negara-negara maju. Di negara maju masih terdapat jutaan orang hidup miskin dan mereka yang hidup tidak miskin relatif masih miskin dibanding dengan yang lain. (Kuncoro, 2003: 121-122).

Dari hal tersebut kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relative (Arsyad, 1999; 238).

Pada dasarnya konsep kemiskinan absolut dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan

pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara baik. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka seseorang dapat dikatakan miskin. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar. Garis batas kemiskinan adalah tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara miskin dengan tidak miskin.

Sedangkan kemiskinan relatif mempunyai pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti “tidak miskin”. Konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada. Miller, 1971 berpendapat bahwa pendapatan sudah mencapai kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitar, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin (Arsyad, 1999; 239-240).

United Nation Research Institute For Social Development (UNRISD) menggolongkan tiga kebutuhan dasar manusia yaitu (Arsyad, 1999; 239):

1. kebutuhan fisik primer yang terdiri dari kebutuhan gizi, perumahan dan kesehatan.
2. kebutuhan kultural yang terdiri dari pendidikan, rekreasi dan ketenangan hidup.
3. kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan yang lebih tinggi.

Berdasarkan pola waktu kemiskinan dibedakan menjadi (BPS, 2000: 2): (1) *persistent poverty* yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun-temurun, biasanya terdapat di daerah yang kritis sumber daya alamnya atau merupakan daerah terisolasi; (2) *cyclical poverty* adalah kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara

keseluruhan; (3) *seasonal poverty* yaitu kemiskinan musiman akibat gagal panen dan musim paceklik, sering dijumpai pada golongan penduduk dengan mata pencaharian nelayan atau petani gurem; (4) *accidental poverty* merupakan suatu keadaan menjadi miskin karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Ditinjau dari sumber penyebab kemiskinan maka kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural (BPS, 2000: 2). Kemiskinan kultural berhubungan dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang lebih banyak dipengaruhi oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan sikap budaya. Menurut ukuran mereka, kehidupannya merasa berkecukupan, tetapi cenderung bersikap apatis dan pasrah, tidak tergerak berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan yang lebih baik, menyebabkan pendapatannya menurun menurut ukuran umum yang dipakai. Menurut ukuran kemiskinan absolut mereka dapat dikatakan miskin, tetapi mereka merasa tidak miskin dan tidak mau dikatakan miskin. Kelompok ini sulit diajak berpartisipasi dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan struktural diakibatkan struktur sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang dan ketidaksamaan kesempatan dan berusaha dan memperoleh pendapatan. Ketimpangan ini pada gilirannya menyebabkan kesenjangan pendapatan dan selanjutnya menimbulkan struktur masyarakat yang timpang.

II.3.1. Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan atau garis kemiskinan di Indonesia ada bermacam-macam. BPS menggunakan batas kemiskinan dari besarnya rupiah yang dibelanjakan

per kapita per-bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2100 kalori per hari.

Sementara Profesor Sajogyo mendasarkan garis kemiskinan pada harga beras yaitu sebagai tingkat konsumsi per kapita setahun yang sama dengan beras, dalam artian konsumsi tersebut ekuivalen dengan harga beras.

Tabel IV.1.
Tingkat Konsumsi Beras per kapita sebagai Indikator Kemiskinan Sajogyo (Kilogram)

Keterangan	Pedesaan	Perkotaan
Melarat	180	270
Sangat Miskin	240	360
Miskin	320	480

Sumber: Kuncoro, 2003: 152

Metode lain yang digunakan adalah yang dikemukakan Profesor Hendra Esmara, yang mencoba menetapkan suatu garis kemiskinan pedesaan dan perkotaan dipandang dari sudut pengeluaran aktual pada sekelompok barang dan jasa esensial seperti yang diungkapkan secara berturut-turut dalam Susenas (Kuncoro, 2003: 153).

IV.3.2. Penyebab Kemiskinan

Kebijakan pembangunan berupaya mengalokasikan sumberdaya dapat diminati oleh sebagian masyarakat. Namun karena cirri dan keadaan masyarakat beragam dan tingkat kemajuan yang masih melemah, maka kebijakan nasional umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan jangka pendek. Sehingga kebijakan pemerintah belum berhasil memecahkan persoalan kelompok ekonomi tingkat bawah. Menurut Fredericks, 1985 mengatakan bahwa kebijakan dalam negeri

seringkali tidak terlepas dengan keadaan yang ada diluar negeri yang secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan antara lain dari segi pendanaan pembangunan (Arsyad, 1999; 237).

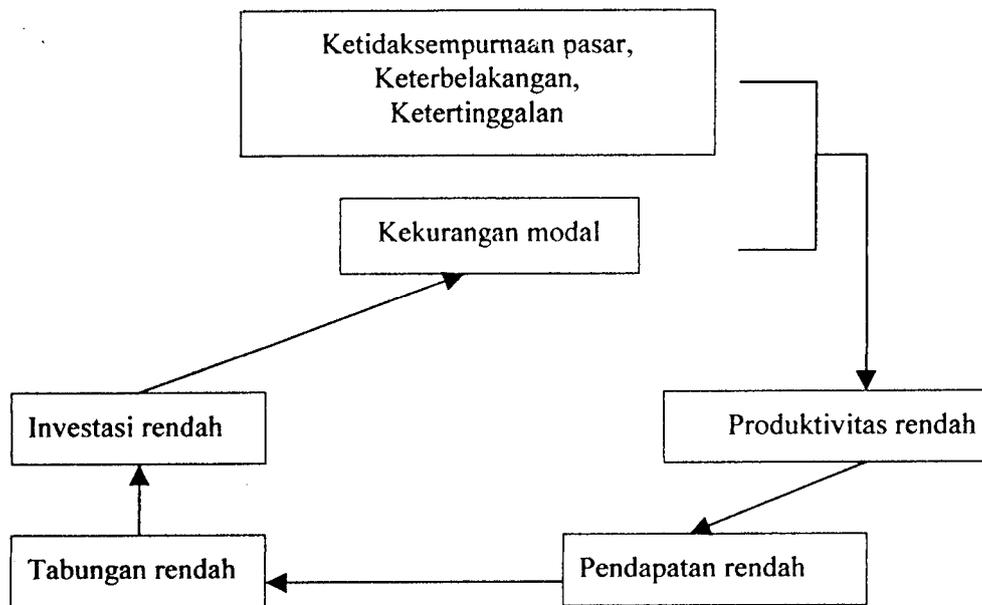
Dipandang dari sisi ekonomi, Sharp mengidentifikasi penyebab kemiskinan sebagai berikut (Kuncoro, 2003: 131):

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia.
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse. Yang dimaksud dengan lingkaran kemiskinan adalah suatu rangkaian kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan di mana suatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi (Sukirno, 1981: 217). Lingkaran ini tidak diketahui ujung pangkalnya sehingga setiap usaha memerangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan (Kuncoro, 2003: 131-132).

Dengan demikian, kemiskinan dapat diamati sebagai kondisi anggota masyarakat yang tidak atau belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam pemikiran faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai (Arsyad, 1999; 237-238).

Namun secara umum faktor utama penyebab kemiskinan sebagian besar karena faktor alamiah. Seseorang menjadi miskin disebabkan mereka dilahirkan dari keluarga miskin. Karena kemiskinan menyebabkan mereka tidak hanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga tidak mampu mengembangkan status sosialnya.



Gambar II
Lingkaran Kemiskinan Versi Nurks

BAB V

METODOLOGI PENELITIAN

V.1 . Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil obyek wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan data 10 tahun antara tahun 1994-2003.

III.2 . Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran terpercaya dan berguna mengenai suatu kejadian, bukan untuk menguji kebenaran hipotesis. Meskipun dalam setiap penelitian dapat merupakan kombinasi dari penelitian dari penelitian deskriptif dan analitik karena analisa baru dapat dijalankan jika telah diperoleh gambaran (deskripsi) dari ciri-ciri variabel yang terkumpul dan sebaliknya hasil akhir suatu penelitian adalah berupa uraian atau gambaran (deskripsi) tentang suatu keadaan atau kesimpulan (Mubyarto,1981;18).

III.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan data SUSENAS (Sensus Ekonomi Nasional) oleh BPS dimana pengumpulan data ini dilakukan setiap tahunnya dan ada yang dikumpulkan untuk 3(tiga) tahun sekali. Data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini merupakan data untuk periode waktu tahun 1994-2003 yaitu.

1. PDRB berdasarkan harga konstan

2. Jumlah penduduk
3. Jumlah penduduk berdasarkan golongan pengeluaran per kapita dan rata-rata pengeluaran per kapita
4. Jumlah penduduk miskin
5. Kondisi obyek penelitian seperti: kondisi geografis, keadaan angkatan kerja dan sebagainya yang menggambarkan kondisi perekonomian di daerah penelitian dan sebagainya.

V. 4. Teknik Analisis Data

V. 4.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada tahun tertentu dihitung dengan rumus (Arsyad, 1999: 17):

$$G = \frac{Y_{r_t} - Y_{r_{t-1}}}{Y_{r_{t-1}}} \times 100\%$$

G = pertumbuhan ekonomi

Y_{r_t} = PDRB tahun t

$Y_{r_{t-1}}$ = PDRB tahun t-1

Sedangkan pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk. Oleh karena itu pendapatan per kapita merupakan PDRB tahun itu dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama.

$$Y_p = \frac{Y}{n}$$

Y_p = pendapatan per kapita (PDRB per kapita)

Y = PDRB

n = jumlah penduduk

Terjadi pertumbuhan ekonomi jika nilai G_{t-1} lebih kecil daripada G_t .

V. 4.2. Indeks Sen

Indeks Sen digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam hal ini pertumbuhan sekaligus pemerataan, karena indeks ini mencakup pendapatan per kapita riil dan indikator ketidakmerataan sekaligus. Dimana ketidakmerataan ditunjukkan dengan Koefisien Gini. Oleh Amartya Sen, Indeks Sen dikemukakan dan dirumuskan sebagai berikut:

$$A = e(1 - G)$$

A = Indeks Sen

e = Pendapatan per kapita riil

G = Koefisien Gini

Jika pertumbuhan ekonomi ingin disebut proses pertumbuhan yang disertai dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pembangunan maka nilai A_{t+1} harus lebih besar daripada A_t (Arief, 1990: 7-9).

V.5. Koefisien Gini

Pengukuran ketidakmertaan pendapatan relatif yang umum dan paling sederhana digunakan adalah Koefisien Gini. Perumusannya sebagai berikut:

$$KG = 1 - \sum_1^n (X_{i+1} - X_i)(Y_{i+1} + Y_i)$$

atau

$$KG = 1 - \sum_1^n f_i(Y_{i+1} + Y_i)$$

KG = Angka Koefisien Gini

X_i = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i

f_i = Proporsi jumlah rumah tangga (penduduk) dalam kelas i

Y_i = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i

V.6. Head Count Index

Head Count Index menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin dalam populasi, meskipun demikian sering dikritik karena mengabaikan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Secara umum dirumuskan sebagai berikut: (Arsyad, 1999: 238).

$$H = \left(\frac{Q}{n} \right) \times 100\%$$

H = *Head Count Index*

Q = jumlah penduduk miskin (berada di bawah garis kemiskinan)

n = jumlah total penduduk

V.8. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Distribusi Pendapatan Dan Tingkat Kemiskinan

Korelasi adalah suatu ukuran untuk mengukur derajat keeratan hubungan antara dua atau lebih variabel atau mempelajari apakah ada hubungan antara dua atau lebih variabel dan jika ada bagaimana arah hubungan dan seberapa besar hubungan tersebut. Hal ini berbeda dengan analisis regresi yang memprediksi seberapa jauh pengaruh suatu variabel (Santoso, 2000: 145).

Dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hubungan pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan dianalisis menggunakan bantuan program SPSS 12.0 dengan $\alpha = 5\%$. Dimana metode korelasi yang digunakan adalah Korelasi Pearson.

Korelasi Pearson dikembangkan oleh Karl Pearson sehingga dinamakan *Pearson Product Moment Coefficient of Correlation*. Arah dan hubungan dua variabel atau lebih dilihat dari nilai Korelasi Pearson (r) yang berkisar antara $-1 \leq r \leq 1$ (Santoso, 2000: 151):

$r \geq 0,5$ maka hubungan antara dua variabel atau lebih sangat kuat

$r \approx 0$ maka hubungan antara dua variabel atau lebih sangat lemah atau mungkin tidak terjadi hubungan sama sekali

$r \leq 0,5$ maka hubungan antara dua variabel atau lebih sangat lemah.

Sedangkan tanda positif (+) dan negatif (-) memberi pengertian tentang arah pola hubungan yang terjadi. Tanda positif (+) artinya hubungan antara dua variabel atau

lebih searah, maksudnya jika satu variabel naik maka variabel lainnya naik. Sebaliknya jika r bertanda negatif (-) artinya hubungan antara dua variabel berlawanan.

BAB VI

PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil pengolahan data dan pembahasannya yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini seperti mengenai pertumbuhan ekonomi sekaligus indikator pertumbuhan selain PDRB per kapita yaitu Indeks Sen, distribusi pendapatan, tingkat kemiskinan, serta hubungan dari pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 1994-2003.

VI.1. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan perhitungan yang bersumber pada data sekunder diperoleh pertumbuhan ekonomi yang disajikan pada tabel VI.1.

Tabel VI.1.
Pertumbuhan Ekonomi
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994-2003
(%)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1994	-
1995	8.09
1996	7.79
1997	3.53
1998	-9.63
1999	0.99
2000	4.01
2001	3.29
2002	3.38
2003	4.09

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel VI.1. diketahui bahwa sebelum krisis ekonomi terjadi, pertumbuhan ekonomi setiap tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 8,09% (1995), dan 7.79 (1996). Hal yang mencolok adalah pada tahun 1998 ketika pada tahun sebelumnya (1997) pertumbuhan ekonomi masih positif 3,53% menjadi -9,63%. Pada saat itu Indonesia terkena krisis perekonomian yang berdampak sangat buruk, dimana krisis perekonomian telah menyebabkan kenaikan inflasi (pada tahun 1998 inflasi di Daerah Istimewa Yogyakarta 77,46%; inflasi di Daerah Istimewa Yogyakarta selengkapnya dapat dilihat di lampiran).

Sedangkan pada tahun 1999 meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi namun lajunya hanya 0,99%. Setelah tahun 1999, perekonomian mengalami kemajuan kembali hal ini ditunjukkan dengan nilai pertumbuhan PDRB yang senantiasa positif; 4,01% (2000); 3,26% (2001); 3,38% (2002); 4.09(2003).

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apa bila dalam jangka panjang mengalami kenaikan. Keadaan seperti perang, kekacauan politik, kemunduran sektor ekonomi yang sifatnya sementara dan namun kegiatan ekonomi secara rata-rata meningkat maka dapatlah dikatakan bahwa telah terjadi pertumbuhan ekonomi. Dari tabel VI.1. dan keterangan di atas diperoleh bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 1994-2003 telah terjadi pertumbuhan ekonomi.

VI.1.1. Indeks Sen

Terjadinya pertumbuhan yang disertai dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pembangunan dapat dilihat dari nilai Indeks Sen. Jika lebih besar dari tahun

sebelumnya maka telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang membawa pemerataan dan peningkatan kualitas pembangunan, tetapi jika nilainya lebih kecil dari tahun sebelumnya maka tidak terjadi pertumbuhan yang membawa pemerataan dan peningkatan kualitas pembangunan.

Tabel VI.2.
Indeks Sen
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994-2003

Tahun	Pendapatan Perkapita (Ribu Rupiah)	Koefisien Gini	Indeks Sen (RibuRupiah)	Keterangan
1994	1402798	0.30	981958	Terjadi Pertumbuhan Ekonomi
1995	1501811	0.34	991195	Terjadi Pertumbuhan Ekonomi
1996	1603056	0.35	1041986	Terjadi Pertumbuhan Ekonomi
1997	1644598	0.34	1085434	Terjadi Pertumbuhan Ekonomi
1998	1475524	0.33	988601	Tidak Terjadi Pertumbuhan Ekonomi
1999	1477633	0.31	1019566	Terjadi Pertumbuhan Ekonomi
2000	1522766	0.29	1081164	Terjadi Pertumbuhan Ekonomi
2001	1557276	0.31	1074520	Tidak Terjadi Pertumbuhan Ekonomi
2002	1594379	0.30	1116065	Terjadi Pertumbuhan Ekonomi
2003	1658940	0.20	1327152	Terjadi Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel VI.2. dapat dilihat Indeks Sen di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang membawa pemerataan dan peningkatan kualitas pembangunan pada tahun-tahun tertentu; 981958(1994);991195 (1995);1041986 (1996); 1085434 (1997); 1019566 (1999); 1081164 (2000); 1116065 (2002); 1327152 (2003).

Selain delapan tahun (1994,1995,1996,1997,1999,2000, 2002 dan 2003), Indeks Sen menunjukkan bahwa pada dua tahun yaitu 1998 dan 2001 tidak terjadi pertumbuhan ekonomi yang membawa pemerataan dan peningkatan kualitas

pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebab pada tahun-tahun tersebut nilai dari Indeks Sen menunjukkan nilai yang lebih kecil daripada tahun sebelumnya, 988601 (1998); dan 1074520 (2001).

Tabel VI.3.
Indeks Sen dan PDRB per kapita
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994-2003

Tahun	PDRB per kapita	Indeks Sen
1994	1.402.798	981958
1995	1.501.811	991195
1996	1.603.056	1041986
1997	1.644.598	1085434
1998	1.475.524	988601
1999	1.477.633	1019566
2000	1.522.766	1081164
2001	1.557.276	1074520
2002	1.594.379	1116065
2003	1.658.940	1327152

Sumber: data diolah

Selama periode penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta, setiap tahun PDRB per kapita mengalami kenaikan dari pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pertumbuhan ekonomi selama tahun penelitian.

Kecuali pada tahun 1998 PDRB per kapita menunjukkan nilai 1.475.524 yang lebih kecil dari tahun 1997 ($1.475.524 < 1.644.598$) yang berarti tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi (penurunan kinerja perekonomian). Sedangkan Indeks Sen pada tahun yang sama lebih kecil dari tahun 1997 ($988601 < 1085435$) yang berarti tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang membawa pemerataan dan peningkatan kualitas pembangunan. Sehingga dilihat dari PDRB per kapita maupun Indeks Sen sama-sama menunjukkan tidak tercapainya pertumbuhan.

Sedangkan pada tahun 1999 dan 2001, telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan nilai PDRB per kapita yang lebih tinggi daripada tahun sebelumnya ($1.477.633 < 1.475.524$ dan $1.557.276 < 1.522.766$). Namun pada tahun yang sama, Indeks Sen menunjukkan nilai yang lebih kecil daripada tahun sebelumnya; 2001 ($1074520 < 1081164$) yang berarti tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang membawa pemerataan dan peningkatan kualitas pembangunan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita sebagai indeks pembangunan kurang begitu memuaskan karena tidak menjangkau sudut-sudut kesejahteraan masyarakat lapisan bawah.

VI.2. Distribusi Pendapatan

Tabel VI.4.
Koefisien Gini
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994-2003

Tahun	Koefisien Gini
1994	0.30
1995	0.34
1996	0.35
1997	0.34
1998	0.33
1999	0.31
2000	0.29
2001	0.31
2002	0.30
2003	0.20

Sumber: BPS

Berdasarkan tabel VI.4. tahun 1994 Koefisien Gini sebesar 0,30; tahun 1995 naik menjadi 0,34 dan selama tahun 1995-1996 Koefisien Gini mengalami kenaikan meski masih dalam kategori ketidakmerataan rendah yaitu 0,34 (1995) dan 0,35

(1996). Dua tahun selanjutnya mengalami penurunan menjadi 0,34 (1997) dan 0,33 (1998). Tahun 1999-2000 nilai Koefisien Gini turun menjadi 0,34 (1999) dan 0.29 (2000). Sedangkan pada tahun-tahun selanjutnya Koefisien Gini bernilai 0,31 (2001) dan 0,30 (2002). Namun pada tahun (2003) merupakan nilai Koefisien Gini terendah selama tahun pengamatan sebesar 0.20 (2003).

Meskipun Koefisien Gini di Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 1994-2003 mengalami kenaikan dan penurunan namun distribusi pendapatan masih dalam kategori ketidakmerataan yang rendah.

VI.3. Tingkat Kemiskinan

Tabel VI.5.
Head Count Index
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994-2003
(%)

Tahun	Head Count Index (%)
1994	13.07
1995	15.00
1996	16.88
1997	19.34
1998	21.79
1999	24.17
2000	31.43
2001	23.07
2002	18.92
2003	27.77

Sumber: data diolah

Dari tabel VI.5. di atas bahwa selama tahun 1994-2003 nilai *Head Count Indeks* terendah pada tahun 1994 sebesar 13,07% yang berarti pada tahun 1994

jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta ada 13,07% dari total penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan nilai *Head Count Indeks* terbesar pada tahun 2000 yaitu 31,43%.

Sepanjang tahun 1994-2000 nilai *Head Count Indeks* terus mengalami kenaikan; 13,07% (1994); 15,00% (1995); 16,88% (1996); 19,34% (1997); 21,79% (1998); 24,17% (1999) dan 31,43% (2000). *Head Count Indeks* pada tahun 2001 (23,07%) dan 2002 (18,92%) mengalami penurunan namun *head count indeks* pada tahun 2003 naik sebesar 27,77% lebih tinggi dibandingkan pada awal tahun pengamatan. Dapat dikatakan bahwa tingkat kemiskinan selama tahun 1994-2003 di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan.

VI.4. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Distribusi Pendapatan Dan Tingkat Kemiskinan

Guna mengetahui hubungan pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan digunakan analisis korelasi Pearson dengan nilai $\alpha=5\%$.

Tabel VI.6.
Korelasi Pearson antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Distribusi Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994-2003

Keterangan	Pertumbuhan Ekonomi	
	Korelasi	Significant
Distribusi Pendapatan	-0.049	0.900
Tingkat Kemiskinan	-0.222	0.566

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel VI.6. terlihat pada $\alpha = 5\%$ besaran korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan tidak signifikan ($0,900 > 0,05$), kemungkinan disebabkan karena ; peningkatan pertumbuhan ekonomi terjadi dikalangan masyarakat kaya maka mampu memacu pertumbuhan dengan baik tetapi distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan semakin parah, namun jika peningkatan pertumbuhan ekonomi terjadi pada masyarakat miskin maka segenap hasilnya harus dibagi secara lebih merata dan hal ini kurang memungkinkan terpacunya GNP secara nasional (Todaro, 2000 :223-224). Korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan negatif dan sangat lemah ($-0,049 < 0,5$) sehingga dapat dikatakan antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan tidak ada korelasi atau hubungan.

Dan pada $\alpha = 5\%$ besaran korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan tidak signifikan ($0,566 > 0,05$). Korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan korelasinya negatif dan lemah ($-0,222 < 0,5$). Sehingga pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan tidak berkorelasi atau tidak berhubungan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dengan menggunakan data *time series* tahun 1994-2003 di Daerah Istimewa Yogyakarta, pertumbuhan ekonomi tidak signifikan berhubungan atau tidak signifikan berkorelasi dengan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Meskipun banyak teori yang menyebutkan bahwa ada hubungan berupa *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dengan memburuknya distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

VII.1. Kesimpulan

1. Dari hasil pengamatan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah tahun 1995. Pada tahun 1995-1997 pertumbuhan ekonomi selalu positif, meskipun pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi bernilai negatif tapi hal ini hanya bersifat sementara sebab pada tahun-tahun selanjutnya menunjukkan peningkatan kinerja perekonomian yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang bernilai positif. Jadi selama tahun 1994-2003 di Daerah Istimewa Yogyakarta telah terjadi pertumbuhan ekonomi
2. Selama tahun 1994-1997 hasil analisis menggunakan Indeks Sen menunjukkan bahwa Indeks Sen selama tahun-tahun tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sehingga dapat dikatakan telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang membawa pemerataan dan peningkatan kualitas pembangunan. Namun pada tahun 1998, 1999 dan 2001 Indeks Sen lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya walaupun kriteria pertumbuhan menggunakan laju pertumbuhan PDRB per kapita menunjuk adanya pertumbuhan (kecuali tahun 1998) sehingga tiga tahun tersebut tidaklah terjadi pertumbuhan ekonomi yang membawa pemerataan dan peningkatan kualitas pembangunan. Meskipun demikian dapat disimpulkan bahwa selama tahun 1994-2003 di Daerah Istimewa

Yogyakarta telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang membawa pemerataan dan peningkatan kualitas pembangunan, dan Indeks Sen dapat dijadikan sebagai indikator pertumbuhan yang lebih baik daripada pendapatan per kapita karena memperhatikan aspek pemerataan dan peningkatan kualitas pembangunan.

3. Selama periode pengamatan yaitu tahun 1994-2003 distribusi pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam kriteria ketidakmerataan yang rendah (0,29-0,35 termasuk dalam interval 0,20-0,35 atau ketidakmerataan rendah). Dengan distribusi pendapatan setiap tahunnya termasuk ketidakmerataan rendah dapat ditarik kesimpulan bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 1994-2003 memiliki ketidakmerataan yang rendah dalam distribusi pendapatannya.
4. Selama tahun 1994-2003 nilai *Head Count Indeks* terendah pada tahun 1994 yaitu 13,07% yang berarti pada tahun 1994 jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta ada 13,07% dari total penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan nilai *Head Count Indeks* terbesar pada tahun 2000 yaitu 31,43%. Sepanjang tahun 1994-2000 nilai *Head Count Indeks* terus mengalami kenaikan, Sedangkan *Head Count Indeks* pada tahun 2001 dan 2002 mengalami penurunan namun *head count indeks* pada tahun 2003 mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan pada awal tahun pengamatan. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 1994-2003 mengalami peningkatan.

VII.2. Saran

Kesimpulan yang diperoleh menunjukkan bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode pengamatan 1994-2003 telah terjadi ketidakmerataan rendah dalam pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan yang meningkat (walaupun pertumbuhan ekonomi sebelum krisis ekonomi lebih tinggi dari pada setelah Indonesia dilanda krisis ekonomi) serta analisis yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak signifikan berhubungan dengan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan.

Saran yang sekiranya dapat diberikan penulis bagi penentuan kebijaksanaan antara lain:

1. Pembangunan ekonomi terutama dalam pemulihan ekonomi perlu diraih dengan usaha sebagai berikut:
 - a. Pemerintah dan masyarakat mengubah asumsi pembangunan ekonomi yang bertitik berat pada pertumbuhan ekonomi menjadi pertumbuhan ekonomi yang secara keseluruhan mencakup pemerataan dan peningkatan kualitas pembangunan (mencakup pertumbuhan berdimensi manusia seperti pengurangan pengangguran, pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia) yang seharusnya bisa berjalan bersama-sama.
 - b. Pemerintah mengatur kebijakan dan menciptakan situasi yang kondusif bagi terciptanya sumber-sumber pertumbuhan dan pembangunan ekonomi seperti

peningkatan jumlah investasi yang masuk, mempertahankan tingkat pertumbuhan disertai dengan perbaikan pemerataan hasil-hasil pembangunan secara berkesinambungan.

2. Distribusi pendapatan yang menunjukkan ketidakmerataan rendah sehingga pemerintah perlu untuk mengusahakan dan mempertahankan ketidakmerataan yang lebih rendah lagi dalam distribusi pendapatan dengan tujuan masyarakat luas dapat merasakan dan menikmati hasil-hasil dari pembangunan. Usaha-usaha pemerintah dapat berupa:
 - a. Perencanaan pembangunan yang saling terkait dan terpadu antara daerah satu dengan yang lain sehingga pembangunan suatu daerah dapat memicu pembangunan daerah yang lain.
 - b. Memberi kesempatan bagi golongan bawah untuk menikmati akses dan haknya sebagai warga negara dengan meningkatkan kesempatan pendidikan, kesehatan, sosial dan hukum, misalkan pengadaan proyek-proyek perbaikan fasilitas kesehatan umum di daerah-daerah pedesaan serta pinggiran dan pusat pemukiman kumuh di kota-kota, program perbaikan gizi bagi anak-anak yang swangat membutuhkan, pembangunan tangki-tangki air bersih, serta penyambungan kabel-kabel listrik ke daerah-daerah terpencil.
 - c. Memaksimalkan sistem perpajakan, misalkan pengambilan sebagian pendapatan golongan-golongan penduduk yang berpenghasilan tinggi melalui pemberlakuan pajak secara proporsional terhadap pendapatan dan kekayaan pribadi mereka, untuk selanjutnya dimanfaatkan guna mengangkat

kesejahteraan lapisan penduduk termiskin. Pajak tersebut diharapkan akan meningkatkan penerimaan pemerintah yang kemudian dapat digunakan untuk berbagai bantuan program pelayanan sosial dan peningkatan kesejahteraan serta pendapatan kelompok-kelompok masyarakat yang berpenghasilan paling rendah. Dengan demikian pajak tersebut dapat mengubah pendapatan masyarakat yang tingkat pendapatannya semula di tentukan oleh kekuatan pasar menjadi disposable income, yakni suatu pendapatan yang bebas dibelanjakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan atau keinginan pemiliknya. Pendapatan disposable milik perorangan atau keluarga merupakan jumlah riil yang tersedia baginya untuk melakukan kegiatan konsumsi aneka barang, jasa-jasa atau untuk ditabung.

3. Diperlukan usaha-usaha dari pemerintah untuk menekan ataupun mengurangi, diantaranya:
 - a. Melaksanakan pembangunan yang berdimensi gender dalam artian pembangunan yang tidak diskriminatif dalam mensikapi keberadaan laki-laki dan perempuan. Adanya partisipasi wanita diharapkan membantu mengatasi masalah kemiskinan meskipun dalam skala kecil.
 - b. Meningkatkan kepedulian pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) atau sektor infomal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Sritua, 1977: *Indonesia -- Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan Massal*, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta.
- Arif, Sritua dan Adi Sasono, 1984: *Ketergantungan dan Keterbelakangan- Sebuah Studi Kasus*, edisi kedua, Penerbit Sinar Harapan dan Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta.
- Arif, Sritua, 1990: *Dari Prestasi Pembangunan Sampai Ekonomi Politik*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Arsyad, Lincoln, 1999: *Ekonomi Pembangunan*, edisi keempat, cetakan pertama, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Baroni, M, 2002: *Krisis, Kemiskinan dan Ekonomi Kerakyatan*, halaman 4-6, Jendela volume II no 5 Buletin STPMD APMD, Yogyakarta.
- BPS DIY: *SUSENAS Daerah Istimewa Yogyakarta* – beberapa edisi, Yogyakarta.
- BPS DIY dan Bapeda DIY: *PDRB Provinsi DIY dirinci per Kabupaten/Kota*, beberapa edisi, Yogyakarta.
- BPS DIY: *Yogyakarta dalam angka*, beberapa edisi, Yogyakarta.
- Dumairy, 1996: *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.

Hill, Hal, 1996: *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1996 -- Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Irawan dan Suparmoko, 2000: *Ekonomika Pembangunan*, BPFE Yogyakarta.

Kuncoro, Mudrajad, 2003: *Ekonomi Pembangunan - Teori, Masalah, dan Kebijakan*, edisi ketiga, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Mubyarto dan Suratno, 1981: *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Yayasan Agro Ekonomika.

Prayitno, Hadi, 1985: *Pengantar Ekonomika Pembangunan*, edisi pertama, BPFE Yogyakarta.

Redaksi Jendela, 2002: *Wajah Kemiskinan Indonesia*, halaman 10-14, Jendela volume II no 5 Buletin STPMD APMD, Yogyakarta.

Santoso, Singgih, 2000: *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*, cetakan pertama, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Sukirno, Sadono, 1981: *Ekonomi Pembangunan - Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan*, edisi kedua, Borta Gorat, Medan.

The World Bank, 2001: *The Quality of Growth – Kualitas Pertumbuhan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Todaro, Michael P, 2000: *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, edisi ketujuh, jilid pertama, Erlangga, Jakarta.

Wibowo, Novianto Dwi, 2003: *Masalah Pengentasan Kemiskinan di Indonesia -- Pendekatan Hipotesis Kuznets*, Pangsa FE UGM edisi 10, Yogyakarta.

Wie, Thee Kian, 1983: *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan - Beberapa Pendekatan Alternatif*, LP3ES, Jakarta.

Wie, Thee Kian, 2001: Reflection on The New Order 'Miracle', dalam Grayson J.Lloyd dan Shannon L: *Indonesia Today – Challenges of History*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.

LAMP IRAN

Lampiran 1

Produk Domestik Regional Bruto Berdasarkan Harga Konstan 1993

Daerah Istimewa Yogyakarta Dirinci Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1994-2003 (Juta Rupiah)

Tahun	Kabupaten/Kota						Provinsi
	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota	Kota	
1994	463.236	756.880	725.912	1.234.722	1.160.094	1.160.094	4.382.741
1995	470.551	811.605	782.517	1.335.484	1.275.361	1.275.361	4.737.111
1996	491.000	866.280	838.463	1.445.705	1.391.715	1.391.715	5.106.349
1997	504.547	892.458	870.958	1.496.861	1.458.020	1.458.020	5.286.367
1998	384.783	809.932	890.348	1.378.089	1.296.097	1.296.097	4.777.199
1999	346.062	820.611	905.619	1.404.658	1.309.434	1.309.434	4.824.446
2000	352.854	845.718	930.497	1.451.772	1.356.541	1.356.541	5.017.709
2001	359.651	871.970	950.887	1.509.835	1.398.143	1.398.143	5.182.544
2002	367.289	900.769	958.051	1.572.524	1.443.414	1.443.414	5.357.669
2003	381.842	943.757	991.521	1.654.682	1.503.456	1.503.456	5.615.557

Sumber BPS, data diolah.

Lampiran 2

Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Daerah Istimewa Yogyakarta
Dirinci Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1994-2003(Jiwa)

Tahun	Kabupaten/Kota					Provinsi
	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota	
1994	425.844	732.437	720.643	783.562	461.800	3.124.286
1995	428.630	740.536	724.685	794.101	466.313	3.154.265
1996	431.511	748.517	729.655	804.366	471.335	3.185.384
1997	433.330	754.974	733.164	814.961	477.954	3.214.383
1998	435.225	760.891	736.292	824.266	480.954	3.237.628
1999	437.930	767.035	739.259	833.603	487.155	3.264.982
2000	440.708	773.158	743.282	844.076	493.903	3.295.127
2001	443.819	780.177	746.451	856.558	500.949	3.327.954
2002	446.843	786.617	749.875	869.586	507.427	3.360.348
2003	449.811	793.421	752.008	880.109	508.678	3.385.027

Sumber BPS, data diolah.

Lampiran 3

Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Daerah Istimewa Yogyakarta
 Dirinci Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1994-2003(Rupiah)

Tahun	Kabupaten/Kota					Provinsi
	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota	
1994	1.087.807	1.033.372	1.007.312	1.575.781	2.512.113	1.402.798
1995	1.097.802	1.095.970	1.079.803	1.681.756	2.734.989	1.501.811
1996	1.137.862	1.157.328	1.149.123	1.797.322	2.952.709	1.603.056
1997	1.164.348	1.182.104	1.187.944	1.836.727	3.050.545	1.644.598
1998	.884.101	1.064.452	1.209.232	1.671.898	2.694.846	1.475.524
1999	.790.222	1.069.848	1.225.036	1.685.044	2.687.921	1.477.633
2000	.800.653	1.093.849	1.251.876	1.719.954	2.746.574	1.522.766
2001	.810.355	1.117.657	1.273.877	1.762.677	2.790.989	1.557.276
2002	.821.964	1.145.118	1.277.614	1.808.359	2.844.575	1.594.379
2003	1.031.442	1.167.405	1.466.541	1.750.187	.830.539	1.760.670

Sumber BPS, data diolah.

Lampiran 4

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Berdasarkan Harga Konstan 1993
Daerah Istimewa Yogyakarta Dirinci Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1994-2003(%)

Tahun	Kabupaten/Kota				Provinsi
	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	
1994	-	-	-	-	-
1995	1.58	7.23	7.8	8.16	8.09
1996	4.35	6.74	7.15	8.25	7.79
1997	2.76	3.02	3.88	3.54	3.53
1998	-23.74	-9.25	2.23	-7.93	-9.63
1999	-10.06	1.32	1.72	1.93	.99
2000	1.96	3.06	2.75	3.35	3.6
2001	1.93	3.1	2.19	4.	3.07
2002	2.12	3.3	.75	4.15	3.24
2003	3.28	4.03	2.08	4.80	3.98

Sumber BPS, data diolah.

Lampiran 5

Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994-2003
(%)

Sector	Tahun										Rata-rata
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
Primer	-	4.39	6.12	3.33	3.54	-5.12	9.52	-1.46	-5.37	0.08	1.670
Pertanian	-	4.27	6.38	3.42	5.22	-5.50	10.22	-1.60	-5.75	8.58	2.804
Pertambangan dan penggalian	-	5.73	3.32	2.27	-15.79	0.37	0.13	0.60	0.17	9.37	0.686
Sekunder	-	7.18	8.81	2.37	-17.39	3.62	0.19	2.33	6.37	0.05	1.503
Industri manufaktur	-	5.50	9.41	1.04	-6.01	3.43	-2.69	2.01	4.08	2.26	2.114
Listrik, gas dan air	-	7.59	11.93	8.58	0.18	12.46	7.88	2.30	3.96	5.71	5.732
Bangunan	-	9.40	7.88	3.76	-32.83	3.21	4.59	2.87	10.35	10.31	2.171
Tersier	-	9.62	7.86	4.07	-10.21	2.01	3.78	5.19	4.96	0.04	3.036
Perdagangan, hotel dan restoran	-	8.46	8.80	3.80	-10.35	2.48	4.02	6.95	1.95	6.68	3.643
Pengangkutan dan komunikasi	-	7.20	6.83	3.16	-8.79	2.13	10.27	10.39	5.02	2.33	4.282
Bank dan keuangan	-	12.38	8.89	4.24	-7.05	0.67	-1.22	3.61	11.03	5.06	4.179
Jasa lainnya	-	10.47	7.21	4.67	-12.47	2.32	2.67	1.54	4.21	1.42	2.449
PDRB	-	8.09	7.79	3.53	-9.63	0.99	4.01	3.29	3.38	0.05	2.389

Sumber : BPS

Lampiran 6

Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994-2003
(%)

Sector	Tahun										Rata-rata
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
Primer	17.82	17.21	16.94	16.91	19.38	18.20	19.17	18.29	16.74	17.95	162.45
Pertanian	16.36	15.78	15.57	15.56	18.12	16.95	17.96	17.11	15.60	16.54	150.66
Pertambangan dan penggalian	1.46	1.43	1.37	1.35	1.26	1.25	1.21	1.18	1.14	1.41	11.79
Sekunder	24.58	24.38	24.61	24.33	22.24	22.82	21.98	21.78	22.41	23.82	23.30
Industri manufaktur	13.73	13.40	13.61	13.28	13.18	14.15	13.24	13.07	13.16	14.46	122.27
Listrik, gas dan air	0.55	0.54	0.57	0.59	0.66	0.73	0.76	0.75	0.76	0.92	6.00
Bangunan	10.30	10.43	10.43	10.46	7.77	7.94	7.99	7.96	8.49	8.44	82.61
Tersier	57.60	58.41	58.45	58.76	58.38	58.97	58.85	59.93	60.85	58.23	536.02
Perdagangan, hotel dan restoran	15.43	15.48	15.63	15.67	15.54	15.77	15.78	16.34	16.11	19.31	143.68
Pengangkutan dan komunikasi	11.46	11.37	11.27	11.23	11.33	11.46	12.15	12.98	13.19	10.48	107.44
Bank dan keuangan	10.15	10.55	10.66	10.73	11.04	11.01	10.45	10.49	11.26	10.97	97.44
Jasa lainnya	20.56	21.01	20.90	21.13	20.46	20.73	20.47	20.12	20.28	17.47	360.36
PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS

Lampiran 7

Produk Domestik Regional Bruto Berdasarkan Harga Konstan 1993

Daerah Istimewa Yogyakarta Dirinci Menurut Lapangan Usaha Tahun 1994-2003 (Juta Rupiah)

Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jumlah
1994	716.889	64.045	601.917	23.994	451.468	676.167	502.371	444.862	901.028	4.382.741
1995	747.526	67.714	635.002	25.815	493.891	733.368	538.537	499.920	995.338	4.737.111
1996	795.211	69.960	694.724	28.896	532.827	797.939	575.293	544.356	1.067.143	5.106.349
1997	822.446	71.548	701.976	31.374	552.853	828.299	593.459	567.462	1.116.950	5.286.367
1998	865.395	60.251	659.816	31.429	371.345	742.580	541.280	527.472	977.631	4.777.199
1999	817.810	60.476	682.440	35.344	383.269	761.008	552.812	531.007	1.000.279	4.824.445
2000	901.380	60.555	664.115	38.128	400.859	791.621	609.593	524.512	1.026.947	5.017.710
2001	886.990	60.917	677.486	39.004	412.355	846.634	672.922	543.471	1.042.764	5.182.543
2002	835.988	61.018	705.157	40.547	455.046	863.124	706.728	603.398	1.086.665	5.357.671
2003	907.797	61.590	721.162	42.867	501.993	920.864	723.207	633.966	1.102.11	5.615.557

Sumber BPS, data diolah.

- Keterangan:
1. Pertanian
 2. Pertambangan
 3. Industri Pengolahan
 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih
 5. Bangunan
 6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran
 7. Pengangkutan dan Komunikasi
 8. Keuangan
 9. Jasa-jasa

Lampiran 8

**Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Berdasarkan Harga Konstan
Daerah Istimewa Yogyakarta Dirinci Menurut Lapangan Usaha Tahun 1994-2003(%)**

Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jumlah
1994	16.36	1.46	13.73	.55	10.3	15.43	11.46	10.15	20.56	100
1995	15.78	1.43	13.4	.54	10.43	15.48	11.37	10.55	21.01	100
1996	15.57	1.37	13.61	.57	10.43	15.63	11.27	10.66	20.9	100
1997	15.56	1.35	13.28	.59	10.46	15.67	11.23	10.73	21.13	100
1998	18.12	1.26	13.81	.66	7.77	15.54	11.33	11.04	20.46	100
1999	16.95	1.25	14.15	.73	7.94	15.77	11.46	11.01	20.73	100
2000	17.96	1.21	13.24	.76	7.99	15.78	12.15	10.45	20.47	100
2001	17.11	1.18	13.07	.75	7.96	16.34	12.98	10.49	20.12	100
2002	15.6	1.14	13.16	.76	8.49	16.11	13.19	11.26	20.28	100
2003	16.7	1.10	12.84	.76	8.94	16.40	12.88	11.26	19.63	100

Sumber BPS, data diolah.

Lampiran 9

Indeks Sen Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994-2003

Tahun	Pendapatan Perkapita (Ribu Rupiah)	Koefisien Gini	Indeks Sen (Ribu Rupiah)
1994	1402798	0.30	981958
1995	1501811	0.34	991195
1996	1603056	0.35	1041986
1997	1644598	0.34	1085434
1998	1475524	0.33	988601
1999	1477633	0.31	1019566
2000	1522766	0.29	1081164
2001	1557276	0.31	1074520
2002	1594379	0.30	1116065
2003	1658940	0.20	1327152

Sumber: BPS, Data Diolah

Lampiran 10

Perhitungan Koefisien Gini Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994

Golongan Pengeluaran per Kapita	Jumlah Penduduk	Pengeluaran Rata-rata per kapita	Pengeluaran Total	Penduduk (%)		Pengeluaran (%)		$f_i (Y_{i+1} + Y_i)$
				f_i	X_i	f_i	Y_i	
< 40.000	1.549.567	26.995	41830561165	53.08	53.08	31.00	31.00	0.164557
40.000 - 59.999	717.857	45.788	32869236316	24.59	77.67	24.36	55.36	0.212369
60.000 - 79.999	300.105	63.443	19039561515	10.28	87.95	14.11	69.47	0.128330
80.000 - 99.999	138.667	83.868	11629723956	4.75	92.70	8.62	78.09	0.070093
100.000 - 149.999	140.127	111.803	15666618981	4.80	97.50	11.61	89.70	0.080542
150.000 - 199.999	54.299	159.836	8678934964	1.86	99.36	6.43	96.14	0.034566
≥ 200.000	18.684	279.114	5214965976	0.64	100	3.86	100	0.012553
Jumlah	2.919.306		1.3493E+11	100		100		0.703010

Sumber BPS, data diolah.

Koefisien Gini = $1 - 0,70 = 0,30$

Lampiran 11

Perhitungan Koefisien Gini Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1995

Golongan Pengeluaran per Kapita	Jumlah Penduduk	Pengeluaran Rata-rata per kapita	Pengeluaran Total	Penduduk (%)		Pengeluaran (%)		$f_i (Y_{i+1} + Y_i)$
				f_i	X_i	Y_i	Y_i	
< 40.000	1.301.071	32.328	42061023288	44.57	44.57	23.06	23.06	0.102765
40.000 - 59.999	819.375	53.022	43444901250	28.07	72.63	23.82	46.88	0.196284
60.000 - 79.999	327.225	73.478	24043838550	11.21	83.84	13.18	60.06	0.119858
80.000 - 99.999	160.547	97.113	15591200811	5.50	89.34	8.55	68.60	0.070756
100.000 - 149.999	172.807	129.471	22373495097	5.92	95.26	12.27	80.87	0.088479
150.000 - 199.999	71.225	185.094	13183320150	2.44	97.70	7.23	88.10	0.041224
≥ 200.000	67138	323.372	21710549336	2.30	100	11.90	100	0.043257
Jumlah	2.919.388		1.82408E+11	100		100		0.662622

Sumber BPS, data diolah.

Koefisien Gini = $1 - 0,66 = 0,34$

Lampiran 12

Perhitungan Koefisien Gini Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1996

Golongan Pengeluaran per Kapita	Jumlah Penduduk	Pengeluaran Rata-rata per kapita	Pengeluaran Total	Penduduk (%)		Pengeluaran (%)		$f_i (Y_{i+1} + Y_i)$
				f_i	X_i	f_i	Y_i	
< 40.000	741.326	31.828	23594923928	25.41	25.41	10.70	10.70	0.027178
40.000 - 59.999	833.702	49.088	40924763776	28.58	53.98	18.55	29.25	0.114144
60.000 - 79.999	496.014	69.212	34330120968	17.00	70.99	15.56	44.81	0.125910
80.000 - 99.999	277.915	89.256	24805581240	9.53	80.51	11.25	56.06	0.096083
100.000 - 149.999	317.555	120.204	38171381220	10.88	91.40	17.30	73.36	0.140862
150.000 - 199.999	143.133	171.792	24589104336	4.91	96.30	11.15	84.51	0.077449
≥ 200.000	107895	316.744	34175093880	3.70	100	15.49	100	0.068234
Jumlah	2.917.540		2.20591E+11	100		100		0.649861

Sumber BPS, data diolah.

Koefisien Gini = $1 - 0,65 = 0,35$

Lampiran 13

Perhitungan Koefisien Gini Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1997

Golongan Pengeluaran per Kapita	Jumlah Penduduk	Pengeluaran Rata-rata per kapita	Pengeluaran Total	Penduduk (%)		Pengeluaran (%)		$f_i(Y_{i+1} + Y_i)$
				f_i	X_i	Y_i	Y_i	
< 40.000	715.097	32.184	23014681848	24.55	24.55	11.02	11.02	0.027038
40.000 - 59.999	1.032.692	49.561	51181248212	35.45	59.99	24.50	35.51	0.164923
60.000 - 79.999	493.618	69.005	34062110090	16.94	76.94	16.30	51.81	0.147959
80.000 - 99.999	256.716	88.026	22597682616	8.81	85.75	10.82	62.63	0.100845
100.000 - 149.999	234.862	121.256	28478426672	8.06	93.81	13.63	76.26	0.111967
150.000 - 199.999	70.225	172.090	12085020250	2.41	96.22	5.78	82.04	0.038159
≥ 200.000	110146	340.594	37515066724	3.78	100	17.96	100	0.068826
Jumlah	2.913.356		2.08934E+11	100		100		0.659717

Sumber BPS, data diolah.

Koefisien Gini = $1 - 0,66 = 0,34$

Lampiran 14

Perhitungan Koefisien Gini Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1998

Golongan Pengeluaran per Kapita	Jumlah Penduduk	Pengeluaran Rata-rata per kapita	Pengeluaran Total	Penduduk (%)		Pengeluaran (%)		$f_i (Y_{i+1} + Y_i)$
				f_i	X_i	f_i	Y_i	
< 40.000	136.276	37.633	5128474708	4.56	4.56	1.52	1.52	0.000693
40.000 - 59.999	661.653	53.537	35422916661	22.14	26.70	10.50	12.02	0.029973
60.000 - 79.999	702.894	72.820	51184741080	23.52	50.22	15.17	27.19	0.092211
80.000 - 99.999	406.137	95.041	38599666617	13.59	63.81	11.44	38.63	0.089442
100.000 - 149.999	533.148	129.861	69235132428	17.84	81.65	20.52	59.15	0.174426
150.000 - 199.999	233.402	173.595	40517420190	7.81	89.46	12.01	71.15	0.101764
≥ 200.000	314988	309.008	97333811904	10.54	100	28.85	100	0.180396
Jumlah	2.988.498		3.37422E+11	100		100		0.668905

Sumber BPS, data diolah.

Koefisien Gini = $1 - 0,67 = 0,33$

Lampiran 15

Perhitungan Koefisien Gini Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1999

Golongan Pengeluaran per Kapita	Jumlah Penduduk	Pengeluaran Rata-rata per kapita	Pengeluaran Total	Penduduk (%)		Pengeluaran (%)		$f_i (Y_{i+1} + Y_i)$
				f_i	X_i	f_i	Y_i	
< 40.000	6.033	36.258	218744514	0.20	0.20	0.04	0.04	0.000001
40.000 - 59.999	120.404	53.365	6425359460	3.98	4.18	1.15	1.19	0.000491
60.000 - 79.999	359.952	70.737	25461924624	11.91	16.09	4.57	5.77	0.008288
80.000 - 99.999	451.467	90.039	40649637213	14.94	31.03	7.30	13.07	0.028129
100.000 - 149.999	843.634	121.607	1.02592E+11	27.91	58.94	18.43	31.49	0.124364
150.000 - 199.999	380.168	170.295	64740709560	12.58	71.51	11.63	43.12	0.093840
≥ 200.000	861101	367.784	3.16699E+11	28.49	100	56.88	100	0.407710
Jumlah	3.022.759		5.56787E+11	100		100		0.662822

Sumber BPS, data diolah.

Koefisien Gini = $1 - 0,66 = 0,34$

Lampiran 16

Perhitungan Koefisien Gini Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2000

Golongan Pengeluaran per Kapita	Jumlah Penduduk	Pengeluaran Rata-rata per kapita	Pengeluaran Total	Penduduk (%)		Pengeluaran (%)		$f_i (Y_{i+1} + Y_i)$
				f_i	X_i	Y_i	Y_i	
< 40.000	4.337	38.186	165612682	0.14	0.14	0.03	0.03	0.000000
40.000 - 59.999	86.737	52.504	4554039448	2.80	2.94	0.96	0.99	0.000288
60.000 - 79.999	351.285	70.641	24815123685	11.34	14.28	5.23	6.23	0.008188
80.000 - 99.999	552.638	90.428	49973949064	17.84	32.12	10.53	16.76	0.041007
100.000 - 149.999	1.063.767	121.030	1.28748E+11	34.34	66.46	27.14	43.90	0.208308
150.000 - 199.999	468.689	171.511	80385319079	15.13	81.59	16.94	60.84	0.158480
≥ 200.000	570205	325.775	1.85759E+11	18.41	100	39.16	100	0.296075
Jumlah	3.097.658		4.744E+11	100		100		0.712347

Sumber BPS, data diolah.

Koefisien Gini = $1 - 0,71 = 0,29$

Lampiran 17

Perhitungan Koefisien Gini Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001

Golongan Pengeluaran per Kapita	Jumlah Penduduk	Pengeluaran Rata-rata per kapita	Pengeluaran Total	Penduduk (%)		Pengeluaran (%)		$f_i (Y_{i+1} + Y_i)$
				f_i	X_i	f_i	Y_i	
< 40.000	3.755	33.150	124478250	0.12	0.12	0.02	0.02	0.000000
40.000 - 59.999	83.850	54.359	4558002150	2.68	2.80	0.86	0.89	0.000243
60.000 - 79.999	319.131	70.715	22567348665	10.19	12.99	4.27	5.15	0.006155
80.000 - 99.999	539.707	90.171	48665919897	17.24	30.23	9.20	14.36	0.033632
100.000 - 149.999	1.028.102	121.365	1.24776E+11	32.84	63.07	23.60	37.95	0.171774
150.000 - 199.999	465.243	172.207	80118101301	14.86	77.93	15.15	53.10	0.135312
≥ 200.000	690.948	358.919	2.47994E+11	22.07	100	46.90	100	0.337895
Jumlah	3.130.736		5.28804E+11	100		100		0.685013

Sumber BPS, data diolah.

Koefisien Gini = $1 - 0,69 = 0,31$

Lampiran 18

Perhitungan Koefisien Gini Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002

Golongan Pengeluaran per Kapita	Jumlah Penduduk	Pengeluaran Rata-rata per kapita	Pengeluaran Total	Penduduk (%)		Pengeluaran (%)		$f_i (Y_{+i} + Y_i)$
				f_i	X_i	Y_i	Y_i	
< 40.000	756	38.650	29219400	0.02	0.02	0.00	0.00	0.000000
40.000 - 59.999	19.314	53.859	1040232726	0.61	0.64	0.14	0.15	0.000009
60.000 - 79.999	138.750	71.418	9909247500	4.40	5.03	1.35	1.50	0.000724
80.000 - 99.999	274.222	90.528	24824769216	8.69	13.72	3.39	4.89	0.005554
100.000 - 149.999	919.763	124.736	1.14728E+11	29.14	42.86	15.68	20.57	0.074192
150.000 - 199.999	616.096	173.516	1.06903E+11	19.52	62.38	14.61	35.17	0.108808
≥ 200.000	1187328	399.594	4.74449E+11	37.62	100	64.83	100	0.508506
Jumlah	3.156.229		7.31883E+11	100		100		0.697793

Sumber BPS, data diolah.

Koefisien Gini = $1 - 0,69 = 0,31$

Lampiran 19

Perhitungan Koefisien Gini Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003

Golongan Pengeluaran per Kapita	Jumlah Penduduk	Pengeluaran Rata-rata per kapita	Pengeluaran Total	Penduduk (%)		Pengeluaran (%)		$f_i (Y_{i+1} + Y_i)$
				f_i	X_i	f_i	Y_i	
< 40.000	552	44150	24370800	0.02	0.02	0.003	0.003	6.0E-12
40.000 - 59.999	17500	56006	9.8E+08	0.52	0.53	0.115	0.117	0.00001
60.000 - 79.999	99750	71444	7.13E+09	0.02	0.55	0.834	0.951	0.00006
80.000 - 99.999	174222	90820	1.58E+10	5.14	5.69	1.851	2.802	0.00108
100.000 - 149.999	999713	125167	1.25E+11	29.47	35.16	14.635	17.437	0.05163
150.000 - 199.999	816321	172480	1.41E+11	24.07	59.23	16.468	33.904	0.09788
≥ 200.000	1283713	440224	5.65E+11	37.85	100.00	66.096	100.000	0.66130
Jumlah	3391771		8.55E+11	100		100		8E-01

Sumber BPS, data diolah.

Koefisien Gini = $1 - 8E-01 = 0,20$

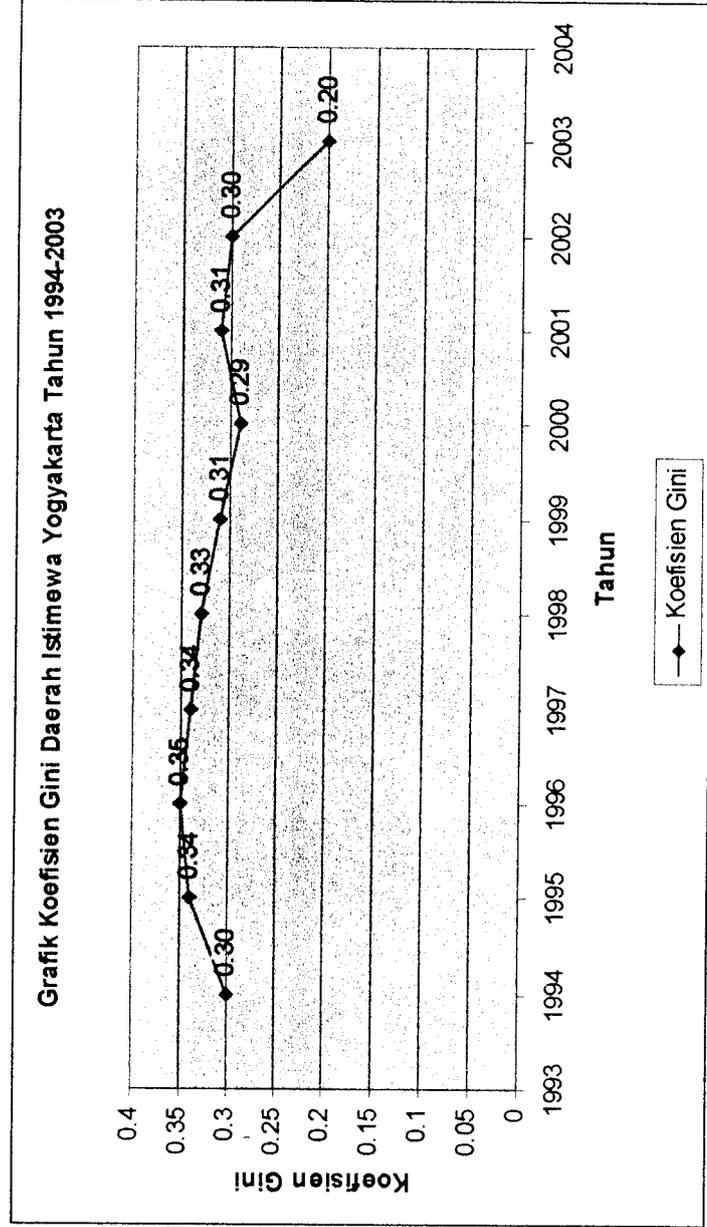
Lampiran 20

Koefisien Gini Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994-2003

Tahun	Koefisien Gini	Keterangan
1994	0.30	Ketidakterataan rendah
1995	0.34	Ketidakterataan rendah
1996	0.35	Ketidakterataan rendah
1997	0.34	Ketidakterataan rendah
1998	0.33	Ketidakterataan rendah
1999	0.34	Ketidakterataan rendah
2000	0.29	Ketidakterataan rendah
2001	0.31	Ketidakterataan rendah
2002	0.30	Ketidakterataan rendah
2003	0.20	Ketidakterataan rendah

Sumber BPS, data diolah.

Lampiran 21



Sumber : BPS, data diolah

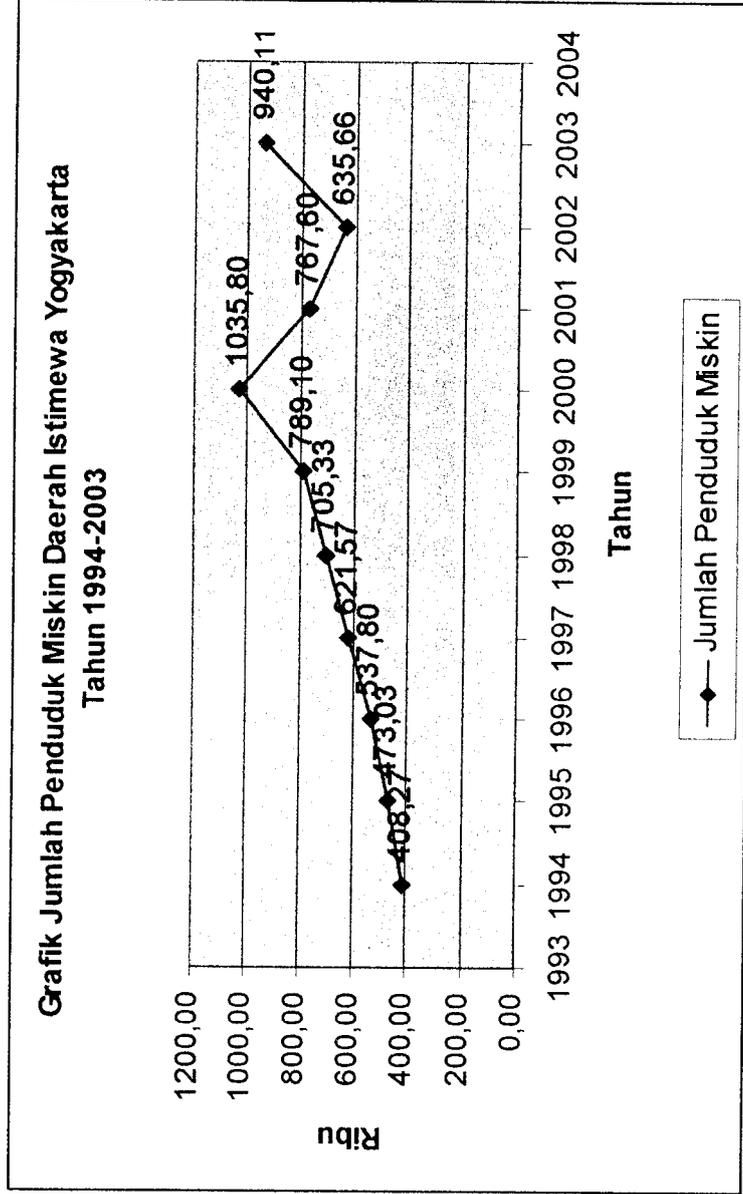
Lampiran 22

Head Count Index Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994-2003

Tahun	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Head Count Index (%)
1994	3124.28	408.27	13.07
1995	3154.26	473.03	15.00
1996	3185.38	537.80	16.88
1997	3214.38	621.57	19.34
1998	3237.62	705.33	21.79
1999	3264.98	789.10	24.17
2000	3295.12	1035.80	31.43
2001	3327.95	767.60	23.07
2002	3360.34	635.66	18.92
2003	3885.03	940.1	27.77

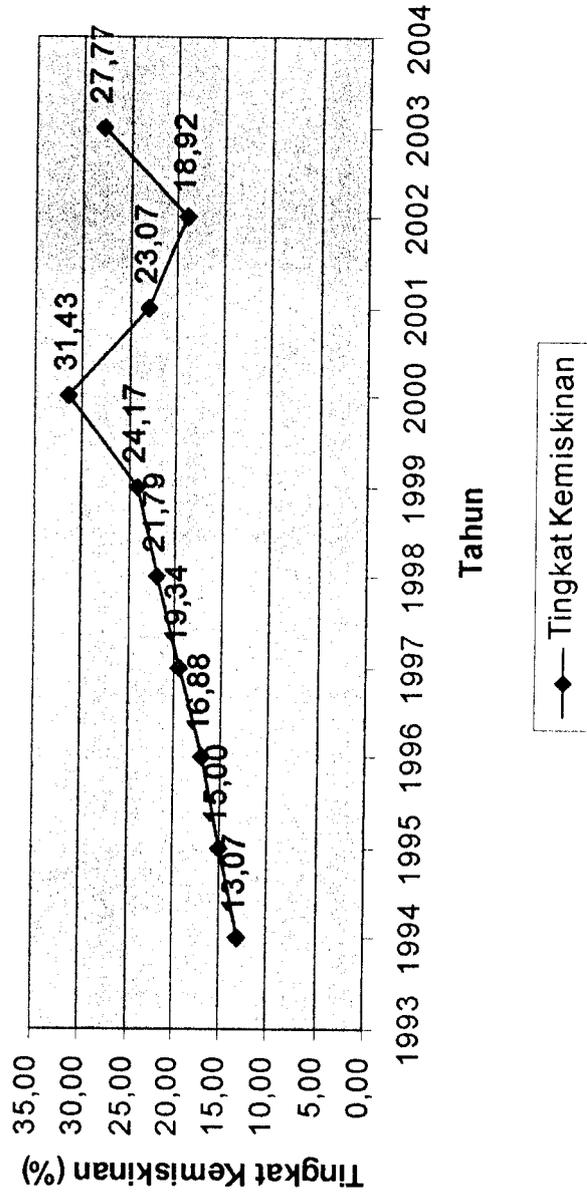
Sumber BPS, data diolah.

Lampiran 23



Lampiran 24

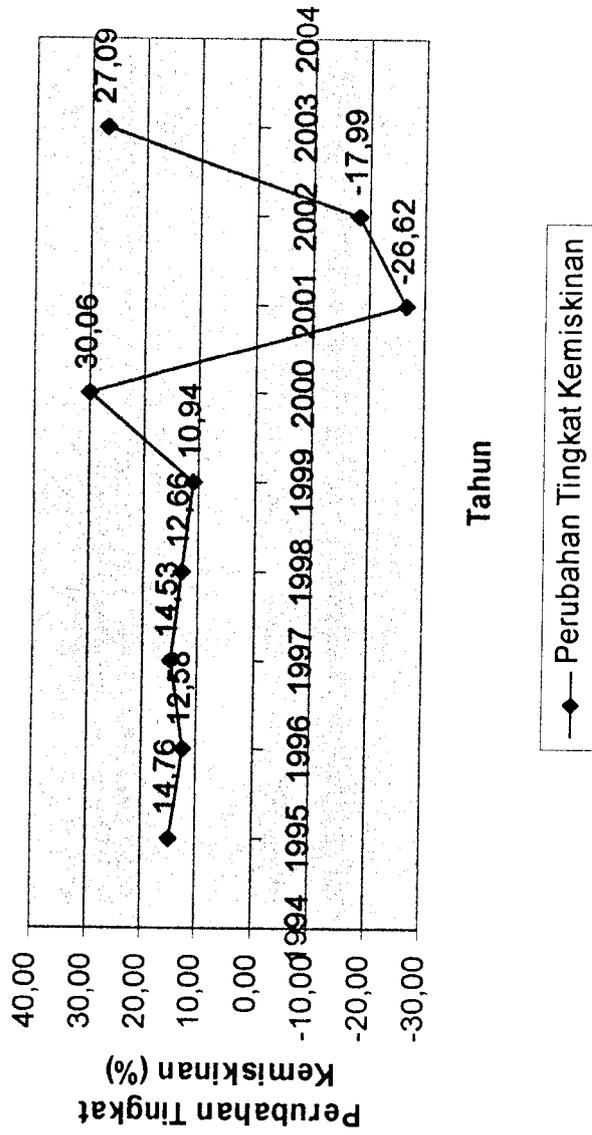
Grafik Tingkat Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 1994-2003



Sumber : BPS, data diolah

Lampiran 25

Grafik Perubahan Tingkat Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994-2003



Sumber : BPS, data diolah

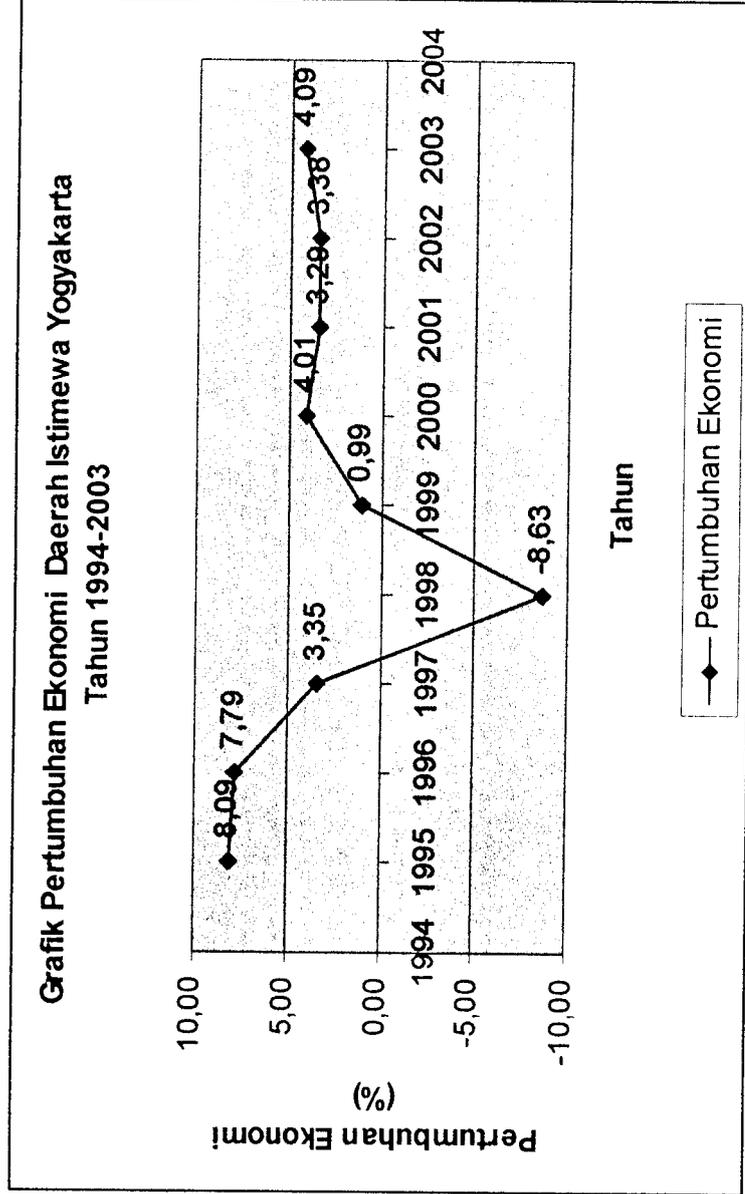
Lampiran 26

Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1993-2002

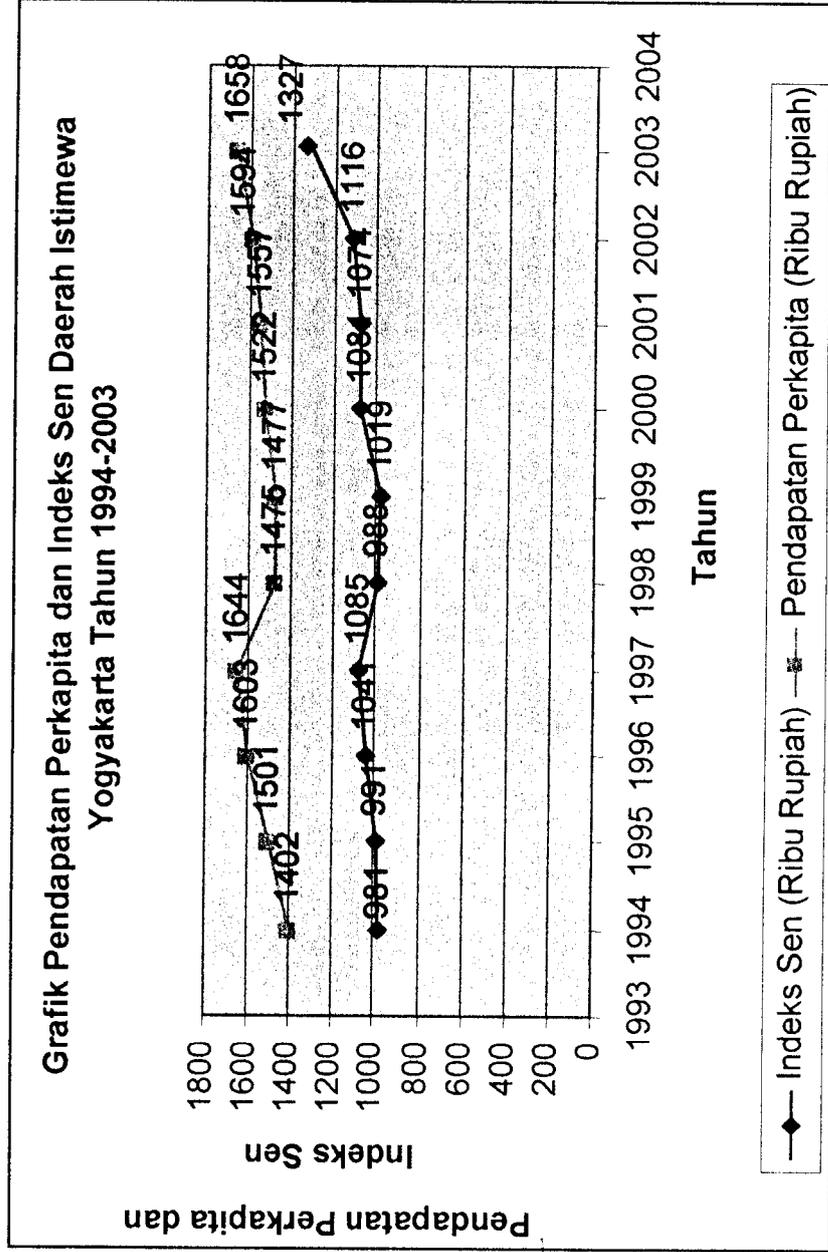
Tahun	PDRB (juta rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1994	4.382.741	8.11
1995	4.737.111	8.09
1996	5.106.349	7.79
1997	5.286.367	3.53
1998	4.777.199	-9.63
1999	4.824.446	.99
2000	5.017.709	4.01
2001	5.182.544	3.29
2002	5.357.669	3.38
2003	5.615.557	4.09

Sumber BPS, data diolah.

Lampiran 27



Sumber BPS, data diolah.



Sumber : BPS, data diolah

Lampiran 29

Case Processing Summary

	Cases							
	Included			Excluded			Total	
	N	Percent		N	Percent	N	Percent	
Distribusi Pendapatan	10	100,0%		0	,0%	10	100,0%	
Tingkat Kemiskinan	10	100,0%		0	,0%	10	100,0%	
Pertumbuhan Ekonomi	9	90,0%		1	10,0%	10	100,0%	

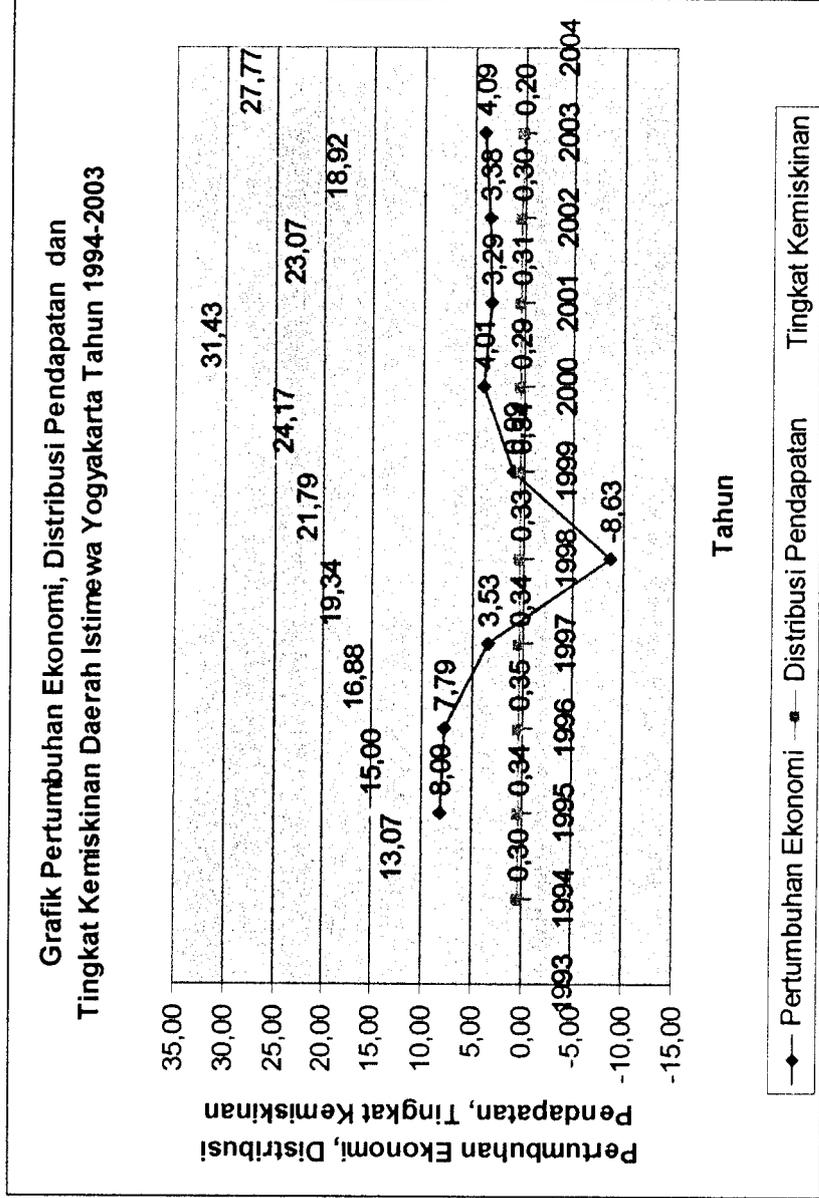
^aLimited to first 100 cases

Case Summaries^a

	Pertumbuhan Ekonomi	Distribusi Pendapatan	Tingkat Kemiskinan
1	-	0.30	13.07
2	8.09	0.24	15.00
3	7.79	0.35	16.88
4	3.53	0.34	19.34
5	-9.63	0.33	21.79
6	.99	0.31	24.17
7	4.01	0.29	31.34
8	3.29	0.31	23.07
9	3.38	0.30	18.92
10	4.09	0.20	27.77
Total N	9	10	10

^aLimited to first 100 cases

Lampiran 31



Sumber : BPS, data diolah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI

BERITA ACARA REVISI SKRIPSI

Pada tanggal di bawah ini telah dilaksanakan ujian skripsi atas:

Nama : *Witadama WA*
Nomer Mahasiswa : *96 213 110*
Dosen Pembimbing : *Drs. Sahabudin Siq. MA*

Materi Skripsi yang direvisi/diperbaiki:

Halaman	Hal-Hal yang perlu diperbaiki
<i>Hal 91</i>	<i>disisipi satu kolom Index dan</i>
	<i>penguluran kepastian</i>

Skripsi tersebut di atas : *diuji lagi/tidak diuji lagi*

Tanggal: *13 Sept. m. 65*

Menyetujui,

Penguji 1

(*[Signature]*)

Penguji 2,

(*[Signature]*)

Penguji 1

(*[Signature]*)

Telah dibimbing revisi oleh,

Penguji 2

(*[Signature]*)

Pembimbing Skripsi

(*[Signature]*)

Catatan:

Maksimum batas waktu revisi adalah tiga minggu setelah ujian berlangsung, jika batas waktu maksimum ini tidak dipenuhi maka mahasiswa akan menanggung segala konsekuensi yang melekat pada hal itu